

**SISTEM POLITIK AMERIKA DI MASAGEORGE W. BUSH  
DAN DESAKAN KELOMPOK NEOKONSERVATIF UNTUK  
MELAKSANAKAN STRATEGI UNILATERAL TERHADAP  
IRAN**

**TESIS**



**OLEH:**

**R. NURUL ASHRI**

**0806449935**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
KAJIAN WILAYAH AMERIKA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : R. Nurul Ashri  
NPM : 0806449935  
Program Studi : Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana  
Judul Tesis : SISTEM POLITIK AMERIKA DI MASA GEORGE W BUSH DAN  
DESAKAN KELOMPOK NEOKONSERVATIF UNTUK  
MELAKSANAKAN STRATEGI UNILATERAL TERHADAP IRAN

Telah berhasil dipertahankan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

### Dewan Penguji

Ketua : Irid Agoes, Phd. (.....)

Pembimbing : Suzie Sudarman, M. A. (.....)

Pembaca : Muhammad Fuad, M. A. (.....)

Penguji 1 : Dr. Riani E Inkiriwang Winter, M. A. (.....)

Penguji 2 : Dr. Nana Nurliana, M. A. (.....)

Ditetapkan di Jakarta,

14 Juli 2011

## Kata Pengantar

Program nuklir Iran dan dukungan Iran kepada kelompok teroris menjadi permasalahan besar yang membuka mekanisme politik pemerintah Amerika. Ketika mekanisme politik terbuka lebar, kelompok Neokonservatif menerapkan ide-ide dan nilai-nilai yang menghasilkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Iran. Semakin kuatnya permasalahan mengenai Iran, semakin meningkatnya kecenderungan kelompok Neokonservatif untuk melakukan intervensi militer terhadap Iran. Menyikapi persoalan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul "*Sistem Politik Amerika Di Masa George W. Bush Dan Desakan Kelompok Neokonservatif Untuk Melaksanakan Strategi Unilateral Terhadap Iran*".

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis berada di bawah naungan Fakultas Pasca Sarjana Jurusan Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia Jakarta. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing, Suzie Sudarman, M. A. atas kepercayaan, dukungan, dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan kepada penulis selama penelitian ini berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada alumni Kajian Wilayah Amerika, Raul Janvierino, M. A., Roosalina, M. A., dan Alexander Peter Sandi Manusiwa, M. A. atas dukungan moril yang telah diberikan kepada penulis selama penelitian ini berlangsung.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi program studi Kajian Wilayah Amerika pada masa yang akan datang demi kemajuan dan kejayaan bangsa.

Jakarta, 14 Juli 2011

R. Nurul Ashri

Penulis

## ABSTRAKSI

Nama : R. Nurul Ashri

Program Studi : Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana

Judul Tesis : SISTEM POLITIK AMERIKA DI MASA GEORGE W BUSH DAN DESAKAN KELOMPOK NEOKONSERVATIF UNTUK MELAKSANAKAN STRATEGI UNILATERAL TERHADAP IRAN

Tesis ini membahas tentang sistem politik Amerika Serikat di masa George W. Bush yang dipenuhi oleh berbagai kelompok kepentingan yang ingin menggunakan pengaruhnya untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingannya. Dalam tesis ini disebutkan tentang kelompok-kelompok kepentingan yang berhasil masuk ke dalam sistem politik pemerintah Bush. Kemudian kelompok-kelompok kepentingan ini bersaing kembali untuk menjadi penggerak utama arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di dalam tesis ini berfokus pada kebijakan di Iran. Kelompok kepentingan yang paling kuat dan paling berkuasa selanjutnya menentukan arah kebijakan luar negeri Amerika terhadap Iran. Kelompok kepentingan terkuat ini adalah kelompok Neokonservatif. Di dalam pemerintahan Bush, kelompok Neokonservatif menerapkan arah kebijakan luar negeri yang radikal yaitu dengan intervensi militer. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem politik Amerika yang terbuka telah memungkinkan kelompok Neokonservatif menggerakkan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Iran.

Kata Kunci: *policy window*, kelompok Neokonservatif, dan intervensi militer.

## ABSTRACT

Name : R. Nurul Ashri  
Department : Kajian Wilayah Amerika, Program Pascasarjana  
Title : SISTEM POLITIK AMERIKA DI MASA GEORGE W BUSH DAN DESAKAN KELOMPOK NEOKONSERVATIF UNTUK MELAKSANAKAN STRATEGI UNILATERAL TERHADAP IRAN

This thesis is talking about the United States political system in the Bush administration period which is filled by many interest groups intending to use its influence to apply a foreign policy which is suitable to their own priorities. This thesis describes the interest groups which had succeeded in getting into Bush administration political system. Then these interest groups competed with each other to be the main player in America foreign policy. America foreign policy in this thesis is focused on Iran policy. The strongest interest group determines America foreign policy in Iran. The strongest interest group is the Neoconservative group. In the Bush administration, Neoconservative group determines a radical foreign policy by applying military intervention. The result of this research summarizes that the opened America political system has made it possible for Neoconservative group to determine America foreign policy in Iran.

Key Words: policy window, Neoconservative group, and military intervention.

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Tesis

Kata Pengantar.....	i
Abstraksi.....	ii
Abstract.....	iii
Daftar Isi.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	9
I.3 Kerangka Teori.....	9
I.4 Hipotesis.....	12
I.5 Tujuan Penelitian.....	12
I.6 Metode Penelitian.....	12
I.7 Kerangka Penulisan.....	13
II. KELOMPOK NEOKONSERVATIF DI DALAM SISTEM POLITIK PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH.....	14
II.1 Program Pengembangan Nuklir Iran.....	14
II.2 Dukungan Iran Kepada Kelompok-Kelompok Teroris.....	15
II.3 Peluang Iran Untuk Mendominasi Kawasan Minyak Di Timur Tengah.....	16
II.4 Penyangkalan Iran terhadap <i>Holocaust</i> .....	19
II.5 Kelompok Neokonservatif.....	21
II.6 Kebijakan Radikal Kelompok Neokonservatif di Iran.....	25

III.	SUDUT PANDANG KELOMPOK NEOKONSERVATIF MENDESAK PRESIDEN BUSH UNTUK MELAKUKAN INTERVENSI MILITER TERHADAP IRAN.....	31
	III.1 Hobbessian Liberalisme.....	31
	III.2 Mahzab Jacksonian.....	33
	III.3 Mahzab Hamiltonian.....	37
IV.	KELOMPOK NEOKONSERVATIF MENDESAK PRESIDEN BUSH UNTUK MELAKUKAN INTERVENSI MILITER TERHADAP IRAN.....	50
	IV.1 Kelompok Neokonservatif Mempengaruhi Lembaga Legislatif.....	50
	IV.2 Kelompok Neokonservatif Mempengaruhi Lembaga Eksekutif.....	55
V.	KESIMPULAN.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	62
	LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang Masalah

Perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran dimulaisejak Revolusi Islam Iran. Pada tahun 1979, terjadi revolusi besar di Iran. Revolusi ini menggulingkan pemerintahan Shah Reza Pahlevi yang didukung oleh Amerika Serikat. Ketika revolusi berlangsung, bentrokan antara pengunjuk rasa pendukung Ayatollah Khomeini dan tentara Shah Iran yang dipersenjatai senapan G3 buatan Belgia terjadi di pusat kota. Huru hara pun terjadi di pusat kota dan menyebar hingga ke kawasan terpencil (Naji, 2009). Dalam kerusuhan tersebut, para pendukung Khomeini berhasil mengambil alih semua pusat kekuasaan pemerintahan Shah Iran dan berhasil menggulingkan kekuasaan Shah Iran. Pada 11 Februari 1979, para pendukung Khomeini tersebut menyatakan kemenangan sebuah revolusi. Revolusi yang dikenal dengan Revolusi Islam Iran tersebut telah mendudukkan Ayatollah Ali Khomeini menjadi pemimpin Iran.

Sejak Khomeini memimpin Iran, ia bertekad untuk menghilangkan segala bentuk pengaruh Amerika di Iran dan di seluruh dunia. Dalam setiap khutbah salat jumat di Teheran, Ayatullah Khomenei selalu mengatakan, “rezim Amerika Serikat merupakan musuh pemerintahan Islam (Iran) dan revolusi kita. Amerika Serikat itu musuh revolusi kalian, iman Islam kalian, dan perlawanan kalian terhadap kejahatan Amerika Serikat” (*Associated Press*, 2005). Khomenei juga mengatakan bahwa segala bentuk hubungan dengan Amerika Serikat bisa membahayakan kemerdekaan Iran dan kemajuan Islam di seluruh dunia. Maka ia pun menyerukan perang suci melawan Amerika. Dalam pidato di hadapan rakyat Iran, ia pernah mengatakan, “peperangan melawan agresi, ketamakan, rencana, dan kebijakan Amerika dianggap jihad, dan siapa pun yang terbunuh dalam perang tersebut adalah syuhada” (Naji, 2009).

Pada 4 November 1979, para pendukung Khomeini bergabung dalam gerak jalan menuju gedung bata merah kedutaan Amerika Serikat di pusat kota

Teheran. Begitu sampai di kedutaan Amerika, para pendukung Khomeini ini berlari memasuki gedung kedutaan dan meneriakkan kata-kata “Matilah Amerika”. Setelah memasuki gedung, mereka menguasai seluruh kompleks kedutaan dan menyandera diplomat, staf, dan prajurit marinir Amerika Serikat (Pitaya, 2009).

Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter berupaya melakukan intervensi militer untuk membebaskan sandera Amerika tersebut. Namun upaya Presiden Carter tersebut mengalami kegagalan dikarenakan gangguan badai pasir yang mengakibatkan kecelakaan maut pada beberapa pesawat Amerika Serikat pembebas sandera ketika sedang melaksanakan operasi penyelamatan sandera tersebut (Pitaya, 2009).

Pemerintahan berikutnya, Ronald Reagan menempuh upaya diplomasi untuk membebaskan sandera warga Amerika tersebut dengan mengirimkan senjata ke Iran untuk ditukarkan dengan para sandera. Upaya yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat berhasil. Para sandera tersebut akhirnya dibebaskan setelah disandera selama 444 hari. Akibat peristiwa ini, Iran dikenai sanksi ekonomi selama 30 tahun oleh Amerika Serikat (Naji, 2009).

Pada masa pemerintahan Bill Clinton, Iran berniat menormalisasikan kembali hubungan dengan Amerika Serikat. Saat itu Presiden Iran Mohammad Khatami berminat untuk melakukan perdamaian dengan Amerika Serikat. Presiden Clinton menerima niat perdamaian yang diupayakan oleh Presiden Khatami tersebut (Mearsheimer dan Walt, 2010). Presiden Clinton mengatakan, “Yang kami inginkan ialah perdamaian tulus dengan Iran. Kami percaya Iran kini tengah berubah ke arah yang positif dan kami ingin mendukung perubahan itu” (*Associated Press*, 1998).

Pada tahun 1998 ada titik temu perdamaian di antara Iran dan Amerika Serikat. Titik temu itu terjadi ketika pegulat Amerika, Zeke Jones menjadi atlet tamu dalam olahraga nasional Iran yaitu gulat di stadion Azadi, pinggiran barat kota Teheran. Presiden Khatami mengundang atlet Amerika Serikat tersebut

sebagai bagian dari upaya normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat. Khatami mengatakan, “Untuk menyiapkan perubahan dan menciptakan kesempatan mempelajari situasi baru, tembok ketidakpercayaan itu harus runtuh dulu” (*Reuters*, 1998).

Pada akhir turnamen final Turnamen Gulat Gaya Bebas Internasional Piala Takhti pada 20 Februari 1998, Jack Jones melambaikan bendera Iran kecil di tengah ring sambil berlari-lari mengelilingi arena. Sementara itu, Kevin Jackson dari Lansing, Michigan, memberikan salam *high five* khas Amerika Serikat kepada ratusan penggemar di Iran yang mengelu-elukan para atlet Amerika tersebut. Saat penyerahan medali, Melvin Douglas dari Topeka, Kansas, mengangkat gambar Ayatullah Ali Khomeini tinggi-tinggi. Sebelumnya Melvin Douglas mengalahkan pegulat nomor satu Iran, Abbas Jadidi. Saat Jadidi dikalahkan, Douglas langsung mendatangi sudut lawan dan memeluknya di hadapan penonton (*Reuters*, 1998).

Kemudian pada September 1998, tim gulat lain dari Amerika Serikat kembali tiba di Iran untuk bertanding dalam Kejuaraan Gulat Dunia. Masyarakat Iran kembali mendukung tim Amerika Serikat dan mendukung tim sendiri. Lagu kebangsaan Amerika Serikat diperdengarkan kembali. Bendera Amerika Serikat pun kembali dinaikan di arena olahraga itu dengan diiringi sorak sorai 12.000 penonton yang berulang-ulang berteriak ‘Amerika! Amerika!’ (*Reuters*, 1998).

Kubu garis keras Iran menganggap hal tersebut sebagai suatu pencederaan Revolusi 1979. Kubu garis keras Iran segera melakukan tindakan untuk menghentikan program-program reformis Presiden Khatami tersebut. Mereka memerintahkan media garis keras untuk melakukan serangan pada setiap indikasi yang mengarah ke perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Mereka juga memerintahkan Lembaga Yudikatif Iran untuk menutup surat kabar kaum reformis. Lembaga Yudikatif juga menghukum beberapa menteri dalam pemerintahan Khatami yang salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri Abdullah Nouri. Ia didakwa dan dijebloskan ke penjara karena menganjurkan

pemulihan hubungan dengan Amerika Serikat (Naji, 2009). Selain Abdullah Nouri, tokoh reformis Iran terkenal lainnya yang namanya dirahasiakan juga dipenjarakan setelah pengadilan memvonisnya bersalah atas tuduhan melakukan mata-mata karena menyelenggarakan jajak pendapat yang mengungkapkan bahwa 74 persen warga Iran menginginkan pemerintah Iran melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat (Naji, 2009).

Hubungan di antara Iran dan Amerika Serikat menjadi lebih buruk ketika George W. Bush menjadi pemimpin Amerika Serikat dan Mahmoud Ahmadinedjad menjadi pemimpin Iran. Ketegangan hubungan di antara Amerika Serikat dan Iran semakin meningkat ketika Presiden Bush dalam pidato *State of The Union* pada akhir Januari 2002, menyebutkan bahwa Iran merupakan bagian dari poros kejahatan negara-negara teroris bersama Irak dan Korea Utara (Shoelhi, 2007).

Ketegangan hubungan ini semakin diperparah oleh publikasi presiden terpilih Iran Mahmoud Ahmadinedjad kepada dunia internasional untuk menghancurkan Amerika Serikat. Dalam perbincangan dengan para pejabat tinggi Iran, ia pernah mengungkapkan bahwa “zaman kejayaan Amerika Serikat sudah hampir berlalu dan Iran harus berusaha secara maksimal untuk mempercepat keruntuhan Amerika Serikat” (Naji, 2009). Ia juga mengungkapkan bahwa “suatu hari nanti, Iran dan Amerika Serikat akan saling berhadapan dalam suatu perang” (*Associated Press*, 2005).

Kesungguhan Iran untuk berhadapan dengan Amerika dalam suatu perang dibuktikannya dengan melakukan serangkaian latihan militer. Berdasarkan informasi yang didapat dari situs online *Washington Post* tahun 2007, diketahui bahwa pada tahun 2006, Pasukan Pengawal Revolusi Iran mengadakan latihan militer angkatan laut dan angkatan udara selama dua hari. Menurut beberapa laporan media Iran dalam situs ini yang namanya dirahasiakan, pasukan yang ambil bagian dalam latihan militer ini ialah pasukan rudal Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari Pasukan Pengawal Revolusi Iran. Latihan militer ini

dilakukan untuk menghadapi sejumlah besar pasukan militer dari Amerika Serikat (*Washington Post*, 2007).

Dalam latihan ini, Iran juga melakukan ujicoba sistem rudal penangkis serangan udara tipe 'TOR-M1'. Menurut laporan media Iran lainnya yang namanya juga dirahasiakan, pasukan Iran melakukan latihan militer di Teluk Persia dan di markas Angkatan Udara Oman. Pada hari pertama latihan militer, tentara Iran berhasil menembakkan rudal penangkis serangan udara tipe 'TOR M1' yang diimpor dari Rusia (*Washington Post*, 2003).

Ketika Iran sedang melakukan latihan perang, rekaman video yang disiarkan Stasiun Televisi Nasional Iran menunjukkan, di suatu padang pasir, ketika beberapa rudal penangkis serangan udara ditembakkan, rudal-rudal ini berhasil mengenai sasaran di udara. Sistem rudal penangkis serangan udara itu merupakan satu-satunya sistem pertahanan udara yang maju di dunia dewasa ini dan yang dapat menangkap, membedakan serta mengunci 48 sasaran pukulan di udara secara serempak. Sistem itu dapat melacak dan segera menembak secara tepat dua sasaran militer pada ketinggian 6000 meter sampai 20.000 meter di udara, serta dapat dengan cepat menembak sekali lagi. Menurut kontrak yang ditandatangani Iran dan Rusia pada bulan November tahun 2005, Rusia akan kembali memberikan sistem rudal penangkis serangan udara senilai 1,4 miliar dolar AS kepada Iran (*Washington Post*, 2007).

Menurut situs ini, selama tahun 2006, Iran pernah mengadakan latihan militer dalam skala besar sebanyak tigakali. Setelah memasuki tahun 2007, Iran berturut-turut mengadakan latihan militer sebanyak dua kali dalam waktu kurang dari satu bulan. Latihan militer yang dilakukan Iran ini diadakan selama kegiatan perayaan genap 29 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran. Menteri Pertahanan Iran, Mustafa Mohammad Najjar dalam pidatonya kepada media Iran menyatakan dengan tegas tentang kesiapan Iran untuk mengantisipasi ancaman militer yang mungkin dilancarkan Amerika terhadap sarana nuklir Iran (*Washington Post*, 2007).

Ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran telah memicu permasalahan yang serius bagi Amerika Serikat. Ketika permasalahan-permasalahan ini muncul, kelompok Neokonservatif berupaya menerapkan agendanya untuk menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri Amerika di Iran. Berikut ini akan penulis jelaskan tentang *profile* kelompok Neokonservatif secara garis besar.

Kelompok Neokonservatif pertama kali didirikan oleh tiga orang Demokrat yang tidak sepaham pandangannya dengan partai tersebut. Ketiga orang tersebut memiliki pandangan yang keras dalam masalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ketiga orang tersebut adalah Scoop Jackson, Moynihan, dan Meany. Mereka bertiga membentuk lingkaran Jackson-Moynihan-Meany. Richard Perle, Jeane Kirkpatrick, Norman Podhoretz, Midge Decter, Elliot Abrams adalah para intelektual kebijakan luar negeri yang menjadi bagian dari aliansi Moynihan-Jackson-Meany. Mereka kemudian membentuk sebuah kelompok kepentingan yang memiliki sudut pandang keras berdasarkan lingkaran Moynihan-Jackson-Meany. Kelompok tersebut dikenal dengan nama kelompok Neokonservatif (Harwood dan Seib, 2008).

Beberapa anggota penting kelompok Neokonservatif adalah warga keturunan Yahudi yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan keuangan yang memadai. Warga Amerika keturunan Yahudi ini memainkan peran penting dalam mengedepankan agenda kelompok Neokonservatif. Mereka menjadi inti dari gerakan Neokonservatisme. Dalam *The Neoconservative Revolution: Jewish Intellectuals and The Shaping of Public Policy*, yang dikutip oleh Stephen M. Walt, Murray Friedman menginformasikan bahwa Neokonservatisme adalah terdiri dari sejumlah besar konservatisme Yahudi Amerika. Akan tetapi tidak semua penganut Neokonservatif adalah orang Yahudi. Ada sejumlah tokoh bukan Yahudi yang merupakan anggota kelompok Neokonservatif seperti editor *Wall Street Journal* Robert Bartley, mantan Menteri Pendidikan William Bennett, mantan Perwakilan Amerika Serikat di PBB John Bolton dan Jeane Kirkpatrick, dan mantan direktur CIA James Woolsey. Warga Amerika keturunan Yahudi

memiliki peran yang besar dalam gerakan Neokonservatisme, akan tetapi warga yang bukan keturunan Yahudi juga aktif dalam gerakan ini. Berbagai *think tank*, komite, yayasan, dan publikasi kaum Neokonservatif telah melakukan kerjasama yang erat untuk merealisasikan agendanya (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Selain itu, kelompok Neokonservatif memiliki kemampuan untuk mendudukkan anggota-anggotanya pada posisi-posisi berpengaruh di dalam pemerintahan Bush. Kelompok Neokonservatif mendudukkan Elliot Abrams, Kenneth Adelman, William Bennett, John Bolton, Douglas Feith, Jeane Kirkpatrick, Scooter Libby, Richard Perle, Paul Wolfowitz, James Woolsey dan David Wurmser pada posisi pembuat kebijakan di dalam pemerintahan Bush. Mereka juga mendudukkan Paul Wolfowitz dan Douglas Feith pada posisi pejabat teras di dalam pemerintahan Bush. Sementara itu, Richard Perle, Kenneth Adelman, dan James Woolsey diposisikan sebagai tokoh sipil nomor dua dan nomor tiga di Pentagon. Adapun Scooter Libby diposisikan sebagai kepala staf wakil presiden. Sedangkan John Bolton didudukkan sebagai pembantu menteri luar negeri untuk urusan pengendalian senjata dan keamanan internasional, dan David Wurmser menjadi asisten khususnya. Kelompok Neokonservatif juga memosisikan Elliot Abrams sebagai penanggung jawab atas kebijakan Timur Tengah di *National Security Council*. Kelompok Neokonservatif juga menempatkan John Bolton, David Wurmser, dan Elliot Abrams pada keanggotaan *Defense Policy Board* yang berpengaruh (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Sementara itu, dalam membentuk pandangan umum, kelompok Neokonservatif menyiapkan jurnalis-jurnalis yang bersimpati kepada mereka seperti Robert Bartley, David Brooks, Charles Krauthammer, William Kristol, Bret Stephens, dan Norman Podhoretz, untuk menulis buku, artikel, dan artikel opini serta berusaha mendiskreditkan siapa pun yang berpandangan berbeda. Adapun majalah dan surat kabar kelompok Neokonservatif yang terkemuka adalah *Commentary*, *The New York Sun*, halaman artikel opini *TheWall Street Journal*, dan *TheWeekly Standard* (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Di samping itu, kelompok Neokonservatif memiliki para akademisi yang meliputi Fouad Ajami, Eliot Cohen, Aaron Friedberg, Bernard Lewis, dan Ruth Wedgwood. Mereka juga memiliki tokoh-tokoh pemikir seperti Max Boot, David Frum, Reuel Marc Gerecht, Robert Kagan, Michael Ledeen, Joshua Muravchik, Daniel Pipes, Danielle Pletka, Michael Rubin, dan Meyrav Wurmser. Adapun kelompok-kelompok olah pikir dan advokasi yang dimiliki oleh kaum Neokonservatif seperti *American Enterprise Institute (AEI)*, *Center for Security Policy (CSP)*, *Hudson Institute*, *Foundation for Defense of Democracies (FDD)*, *Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA)*, *Middle East Forum (MEF)*, *Project for a New American Century (PNAC)*, dan *Washington Institute for Near East Policy (WINEP)* (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Kaum Neokonservatif dikenal berpegang teguh pada ideologi politik yang *hawkish*. *Hawkish* di sini maksudnya adalah menyukai jalan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan luar negeri. Trias Kuncahyono dalam bukunya yang berjudul *Irak Korban Ambisi Kaum Hawkishm* tahun 2004 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *hawkish* adalah mereka yang menyenangi perang sebagai bentuk penyelesaian masalah. Kata *hawkish* berasal dari kata *hawk* yang artinya burung elang. Sesuai dengan karakter yang dimiliki burung elang, *hawkish* dianggap memiliki sifat ganas dan garang (Kuncahyono, 2004).

George Soros menyebut kaum *hawkish* ini dengan sebutan kelompok ekstremis. Menurut Soros, Amerika Serikat adalah sebuah pemerintahan negara terkuat di dunia yang telah jatuh ke tangan kelompok ekstremis yang menjalankan konsep mentah Darwinisme Sosial. Konsep Darwinisme Sosial ini merupakan perjuangan untuk bertahan hidup dengan menggunakan kekuatan. Pandangan ini disebut *survival of the fittest*. Artinya, yang paling kuat, dia yang bertahan (Soros, 2004).

Kelompok Neokonservatif telah lama membentuk aspek kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang terkait dengan peperangan. Mereka mendorong Amerika untuk mengeluarkan dana pembangunan kekuatan militer dan

pengembangan sistem persenjataan baru. Mereka juga aktif mencari publikasi secara terang-terangan untuk membentuk opini publik maupun opini elit yang mendorong kebijakan luar negeri Amerika ke arah yang mereka sukai.

Mengingat orientasi mereka yang *hawkish*, kaum Neokonservatif menerapkan kebijakan luar negeri Amerika yang bersifat radikal di Iran. Mereka menekankan perlunya penggunaan kekuatan militer dalam kebijakan tersebut. Menurut kelompok Neokonservatif, kekuatan militer merupakan sebuah kebijakan yang sangat tepat digunakan di Iran.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran telah menimbulkan beberapa permasalahan di dalam pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh George W. Bush. Ketika permasalahan-permasalahan ini muncul, kelompok Neokonservatif berupaya untuk menerapkan agendanya yang menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri Amerika yang radikal di Iran, yaitu intervensi militer. Rumusan masalah ini menghasilkan dua buah pertanyaan. Pertama, pertanyaan yang mencakup alasan kaum Neokonservatif menerapkan kebijakan intervensi militer terhadap Iran. Kedua, pertanyaan yang mencakup cara kaum Neokonservatif menerapkan kebijakan intervensi militer terhadap Iran. Jadi, penelitian ini mengedepankan pertanyaan berdasarkan cakupan-cakupan tersebut yaitu: Mengapa kaum Neokonservatif mendorong pemerintah Bush untuk menerapkan kebijakan intervensi militer terhadap Iran? dan bagaimana kaum Neokonservatif mendorong pemerintah Bush untuk menerapkan kebijakan intervensi militer terhadap Iran?

## **I.3. Kerangka Teori**

Untuk menelaah permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sistem politik Amerika dari Stephen D. Krasner dan teori kelompok kepentingan dari Michael Mastanduno. Kedua teori-teori ini tergabung dalam sebuah buku yang berjudul "*American Foreign Policy Theoretical Essays*", yang ditulis oleh G. John Ikenberry pada tahun 1996.

Dengan mengacu pada tulisan Michael Mazaar dalam *The Iraq War and Agenda Setting* pada tahun 2007, yang mengadopsi pemikiran Kingdon, sebuah *problem stream* akan membuka suatu *policy window*. Ketika Suatu *policy window* terbuka, kelompok-kelompok kepentingan akan memaksimalkan upayanya untuk menerapkan *agenda setting* yang menghasilkan suatu kebijakan (Mazaar, 2007). Berdasarkan tulisan Mazaar ini, penulis mengasumsikan bahwa *problem stream* yang dimaksud oleh Mazaar adalah suatu permasalahan yang sedang muncul ke permukaan. Sementara *policy window* merupakan suatu bentuk mekanisme politik yang menarik berbagai kelompok kepentingan untuk menerapkan sebuah agenda atau perencanaan. Sedangkan *agenda setting* merupakan suatu perencanaan yang dihasilkan oleh sebuah kelompok kepentingan. *Agenda Setting* ini pada akhirnya melahirkan sebuah kebijakan.

Kelompok-kelompok kepentingan telah memberikan dampak pada sistem politik Amerika. Dampaknya adalah sistem politik Amerika terdiri dari bermacam-macam kekuatan dan kekuasaan seperti yang dikatakan Stephen D. Krasner berikut ini:

*The central feature of American politics is the fragmentation and dispersion of power and authority. This has been recognized by pluralists such as Dahl, Polsby, and Truman, who tend to emphasize the system's virtues, as well as by writers such as Huntington, Lowi, McConnell, and Burnham, who see the American polity as gravely flawed. Polsby argues that the different branches of the American government were designed so that they would be captured by different interests. Truman notes that the diffusion of leadership and disintegration of policy are not hallucinations. Huntington summarizes the situation as one in which there is a fusion of functions and division of power. Burnham argues that the political system has been in domestic matters at any rate—dispersive and fragmented...dedicated to the defeat, except temporarily and under the direct pressure of overwhelming crisis, of any attempt to generate domestic sovereignty (Ikenberry, 1996).*

Dalam menciptakan suatu *agenda setting*, sebuah kelompok kepentingan yang meliputi pembuat kebijakan, *think tank*, anggota Kongres, dan universitas akan mengadakan pertemuan khusus dengan anggotanya untuk saling bertukar pikiran dan pandangan mengenai sebuah permasalahan besar, sebagaimana

perkataan Kingdon yang dikutip oleh Michael Mazaar dalam *The Iraq War and Agenda Setting* pada tahun 2007 berikut ini, “*they are a bit like academic disciplines, each with their own theories, ideas, preoccupations, and fads.*” (Kingdon, 1984). Mereka mengidentifikasi masalah melalui interaksi, penelitian, dan debat diantara para anggotanya untuk mencapai kesamaan pandangan dalam melihat peristiwa tersebut.

Setelah tercipta kesamaan sudut pandang, mereka bersama-sama mencari solusi terbaik untuk permasalahan tersebut. Setelah solusi terbentuk atas dasar kesepakatan bersama, kelompok kepentingan ini kemudian menginvestasikan waktu, tenaga, energi, reputasi, dan uang untuk mempromosikan ide-ide dan nilai-nilai yang mereka dukung. Mereka memperkenalkan legislasi, mengadakan pembicaraan publik, dan membentuk komisi. Mereka bergabung ke dalam konstruksi sosial yang lebih luas untuk mempengaruhi jalan pikiran dan keyakinan komunitas sosial luas yang berbeda terhadap peristiwa itu agar tercipta keseragaman dalam cara pandang dunia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas terhadap ide-ide dan nilai-nilai yang akan mereka bawa ke lembaga pemerintahan.

Di dalam pemerintahan, kelompok kepentingan ini meduduki posisi-posisi penting untuk mengarahkan agendanya. Mereka mempengaruhi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif agar bergerak menurut agendanya. Bagi Michael Mastanduno, kelompok-kelompok kepentingan ini berusaha untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Mereka memberikan tekanan kepada lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat. Mereka mendorong anggota *House of Representatives* dan Senat untuk membuat kebijakan ke arah yang mereka sukai. Mereka juga mendorong Gedung Putih untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi prioritas mereka. Struktur politik Amerika yang terdesentralisasi membuat kelompok-kelompok kepentingan bersaing mendapatkan pengaruh di cabang-cabang penting pemerintahan (Ikenberry, 1996).

#### **I.4. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tinjauan teori di atas, penulis merumuskan sebuah hipotesa awal sebagai jawaban sementara atas permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menarik hipotesa bahwa sistem politik Amerika Serikat memungkinkan sekelompok orang mempunyai kekuatan besar untuk memberikan suatu pengaruh.

### **I.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah, penelitian ini berupaya untuk:

1. Menunjukkan alasan kaum Neokonservatif mendorong pemerintah Bush untuk melakukan intervensi terhadap Iran
2. Menunjukkan bagaimana kaum Neokonservatif mendorong pemerintah Bush untuk melakukan intervensi terhadap Iran.

### **I.6. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan mengandalkan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara:

- a. Mengumpulkan data sebagai sumber informasi dari buku, jurnal, dan internet.
- b. Membaca dan memahami data yang diperoleh.
- c. Menyeleksi dan menghimpun semua data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- d. Membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka teori.
- e. Meneliti dan menghubungkan data-data yang telah dihimpun dengan teori yang ada dan dengan objek penelitian.

Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan teknik penulisan deskriptif untuk mengungkapkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan sehingga menjadi informasi baru yang bermanfaat bagipengetahuan. Melalui teknik penulisan deskriptif, penulis menguraikan teori-teori yang dipakai beserta fakta-

fakta dan pendapat-pendapat penulis secara terperinci sehingga didapatkan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu di dalam tesis ini.

### **I.7. Kerangka Penulisan**

Bab 1 pada penelitian ini membahas pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, hipotesis, dan kerangka. Bab 2 pada penelitian ini membahas kelompok-kelompok kepentingan di dalam sistem politik George W Bush. Bab 3 pada penelitian ini menjelaskan ideologi dan mahzab dari kelompok Neokonservatif. Bab 4 pada penelitian ini membahas desakan kelompok Neokonservatif untuk menerapkan kebijakan intervensi militer terhadap Iran. Bab 5 pada penelitian ini mengemukakan beberapa kesimpulan penulis sebagai intisari dari hasil penelitian ini.

## **BAB II**

### **KELOMPOK NEOKONSERVATIF DI DALAM SISTEM POLITIK PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH**

Ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran menimbulkan sejumlah besar permasalahan yang harus dihadapi oleh Amerika Serikat. Permasalahan yang muncul tersebut seperti pengembangan nuklir Iran, dukungan Iran kepada kelompok teroris, penyangkalan pemimpin Iran terhadap *Holocaust*, dan peluang Iran untuk mendominasi kawasan minyak di Timur Tengah. Berikut ini akan dijelaskan satu per satu mengenai permasalahan besar yang harus dihadapi Amerika sebagai dampak hubungan yang tidak baik dengan Iran.

## II. 1. Program Pengembangan Nuklir Iran

Program pengembangan nuklir Iran di dalam negerinya merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi Amerika Serikat. Program nuklir ini memungkinkan Iran untuk membuat senjata nuklir. Terkait hubungan Amerika Serikat dan Iran yang tidak bersahabat setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979, senjata-senjata nuklir yang dibuatnya tersebut kemungkinan besar akan diberikan kepada kelompok teroris untuk menyerang daratan Amerika Serikat dalam skala yang lebih luas dari peristiwa 9/11. Selain itu, senjata nuklir tersebut dapat digunakan Iran untuk menyerang Israel dan pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah.

Ketika Mahmoud Ahmadinejad menjadi pemimpin Iran, program pengembangan nuklir Iran dijalankan secara tersembunyi. Pengembangan nuklir tersebut baru diketahui dunia internasional ketika pada tanggal 15 Agustus 2003, kelompok oposisi Iran yang terusir (*Mujahedin-e-Khalq Organization* atau yang disingkat dengan MKO) memberitahu pemerintah Amerika bahwa Iran telah membangun dua fasilitas nuklir di Isfahan dan Natanz. Pernyataan MKO ini terbukti setelah CNN menayangkan foto-foto satelit keberadaan pabrik-pabrik nuklir Iran (Naji, 2009).

Maka pada tahun 2007, kepala IAEA Mohammad El-Baradei mengunjungi fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Isfahan. Direktur IAIE, Mohammad Al-Baradei, pada saat mengunjungi fasilitas nuklir di Natanz, menemukan 164 buah mesin pemisah yang telah terpasang dan 10.000 mesin

pemutar yang dapat memutar gas UF<sub>6</sub> pada kecepatan tinggi untuk menghasilkan uranium yang telah diperkaya (*enriched uranium*). Menurut El-Baradei, Iran sendiri mengaku telah menghasilkan dan menyimpan 175 ton UF<sub>6</sub> yang bisa menghasilkan uranium diperkaya untuk dua puluh bom nuklir seperti yang digunakan di Hiroshima (Naji, 2009).

Seorang ahli terkemuka masalah proliferasi, Leonard S. Spector mengatakan:

Iran diam-diam mengalami kemajuan dari dua jalur yang berbeda menuju senjata nuklir. Pertama, Iran telah selesai membangun fasilitas uji coba untuk melakukan pengayaan uranium di Natanz, menggunakan mesin-mesin pemisah berkecepatan tinggi—teknologi canggih tetapi sekarang telah menyebar dengan pesat. Kalau diperbesar, fasilitas tersebut akan mampu menghasilkan banyak sekali uranium diperkaya sampai ke tingkat sama untuk senjata nuklir sebagaimana yang digunakan di Hiroshima. Kedua, Iran sepertinya telah selesai atau hampir selesai membangun sebuah fasilitas di Arak untuk membuat air berat—produk untuk keperluan reaktor yang dirancang untuk membuat plutonium. Bahan ini digunakan dalam bom Nagasaki (*Yale Global*, 2003).

## II.2. Dukungan Iran Kepada Kelompok-Kelompok Teroris

Dukungan Iran kepada kelompok-kelompok teroris merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi Amerika Serikat. Iran telah lama menjadi pendukung Al-Qaeda, Jihad Islam, dan Hizbullah (Mearsheimer dan Walt, 2010). Iran kerap kali melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok teroris tersebut dalam melakukan kegiatan terorisme. Bahkan kelompok Hizbullah adalah kelompok yang dibentuk oleh Iran (Boroumand, 2002). Menurut laporan *Times of London* tahun 1998, yang dikutip dalam buku tulisan Lada Boroumand tahun 2002 yang berjudul *Teror, Islam, dan Demokrasi*, kelompok Hizbullah telah melakukan kerjasama dengan jaringan Al-Qaeda dalam operasi-operasi internasional sejak awal 1990-an (Boroumand, 2002). Kemudian jaringan teroris Hizbullah di Lebanon yang terdiri atas kelompok Sunni, Syiah, dan sebuah sayap Arab Saudi juga pernah melakukan kerjasama dalam pengeboman Menara Khobar pada tahun 1996. Pengeboman ini menewaskan 19 anggota pasukan Amerika Serikat (Boroumand, 2002).

Deengan mengetahui kelompok Hizbullah telah melakukan kerjasama dengan jaringan Al-Qaeda dalam operasi-operasi internasional sejak awal 1990-an dan dengan mengetahui Hizbullah pernah terlibat dalam pengeboman Menara Khobar yang menewaskan 19 anggota pasukan Amerika, maka serangan 9 September yang menghancurkan *World Trade Center* dan Pentagon serta menewaskan sejumlah besar warga Amerika Serikat, pastinya didukung oleh Iran. Mengingat pelaku serangan tersebut adalah jaringan Islam fundamental Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden.

### III.3. Peluang Iran Untuk Mendominasi Kawasan Minyak Di Timur Tengah

Peluang Iran untuk mendominasi kawasan minyak di Timur Tengah merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi Amerika Serikat. Sebelumnya Irak telah menjadi pesaing utama Iran di kawasan Timur Tengah, tetapi saat ini Irak berada dalam kondisi tidak baik sehingga tidak berada dalam posisi untuk mengimbangi Iran. Sejak pasukan Amerika Serikat melakukan intervensi militer terhadap Irak, kondisi negara tersebut berada dalam kehancuran. Irak harus melewati masa transisi yang pahit. Kondisi negara tersebut diperburuk dengan pemberontakan-pemberontakan terhadap pasukan Amerika yang ditempatkan di Irak pasca invasi, yang disewa pemerintah Amerika melalui perusahaan-perusahaan penyedia mereka. Pergeseran keseimbangan regional ini menerangkan mengapa sebagian orang berkomentar bahwa pemenang dalam Perang Irak (lawan Amerika) adalah Iran (*Los Angeles Times*, 2006). Dengan tidak adanya pesaing kuat seperti Irak di Timur Tengah, maka Iran memiliki peluang yang sangat besar untuk mendominasi kawasan minyak di Timur Tengah.

John Mearsheimer dan Stephen Walt dalam bukunya yang berjudul *Dahsyatnya Lobi Israel* pada tahun 2010 menyangkal pendapat umum yang menyatakan bahwa intervensi militer yang akan dilancarkan Amerika terhadap Iran adalah demi menguasai cadangan minyak Iran dan demi kepentingan perusahaan tertentu seperti *Halliburton* yang dimiliki oleh Wakil Presiden Dick

Chenney. Mereka juga menyangkal pendapat pengamat-pengamat di Amerika dan di luar Amerika bahwa minyak menjadi motivasi di balik rencana serangan ke Iran. Selain itu, sangkalan mereka juga dialamatkan pada masyarakat dunia yang menganggap bahwa pemerintah Bush memiliki tekad untuk menguasai cadangan minyak di Iran di mana hal tersebut akan memberi Amerika Serikat posisi tawar yang sangat tinggi dalam geopolitik (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Bagi penulis, pernyataan mengenai rencana intervensi militer terhadap Iran demi penguasaan minyak dapat diterima mengingat arti penting minyak dalam perekonomian Amerika Serikat. Mengingat cadangan minyak bumi Amerika Serikat telah berkurang sekalipun Amerika mempunyai teknologi dan peralatan modern untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan investasi. Berkurangnya cadangan minyak bumi tersebut menyebabkan krisis minyak di Amerika Serikat. Krisis ini diperparah dengan kegagalan Amerika Serikat membangun cadangan minyak bumi raksasa di dalam negerinya.

Akan tetapi Mearsheimer dan Walt mengungkapkan bahwa untuk menutupi krisis minyak di dalam negerinya, Amerika dapat bekerjasama dengan produsen-produsen penghasil minyak di Iran dan tidak menginginkan penguasaan atas cadangan minyak Iran. Menurut mereka, Amerika Serikat justru akan berpihak kepada produsen-produsen minyak besar Iran sehingga perusahaan-perusahaan minyak Amerika akan mendapatkan keuntungan dengan membantu mereka mengembangkan sumber daya minyak dan membawa hasilnya ke pasar. Mereka juga berpendapat bahwa Amerika tidak menginginkan perang, sanksi atau pergantian rezim di kawasan Iran. Sebab hal-hal tersebut akan mengancam akses mereka ke cadangan minyak Iran. Ketika Wakil Presiden Dick Cheney masih menjadi direktur utama sebuah perusahaan jasa minyak Halliburton, ia menentang sanksi-sanksi Amerika atas Iran. Ia bahkan mengeluhkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika telah dikorbankan oleh kebijakan sanksi (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Menurut Mearsheimer dan Walt, apabila Amerika Serikat berniat untuk menaklukkan Iran demi menguasai cadangan minyaknya, maka Arab Saudi akan lebih menarik untuk dijadikan sasaran penaklukan Amerika, mengingat jumlah cadangan minyaknya lebih besar dan penduduknya lebih sedikit. Selain itu, Osama bin Laden adalah orang yang dilahirkan dan dibesarkan di Arab Saudi. Jika penguasaan atas minyak menjadi motivasi invasi Amerika, maka peristiwa 9/11 dapat menjadi alasan ideal untuk menyamakan aksi pendudukan di Arab Saudi. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Amerika Serikat tidak melakukan aksi pendudukan untuk menguasai cadangan minyak Arab Saudi (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Bagi penulis, pendapat Mearsheimer dan Walt tersebut tidak dapat diterima. Mengingat struktur pemerintahan Amerika Serikat pada masa George W. Bush banyak diisi oleh para direktur perusahaan minyak Amerika. Sebagai contoh, Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Cheney adalah mantan CEO *Halliburton*, sebuah perusahaan besar di bidang konstruksi dan pertambangan. Selain itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleeza Rice adalah mantan Direktur perusahaan *Chevron* yang bergerak di pertambangan minyak bumi (Mashad, 2005).

Pendapat penulis juga didukung oleh Wirawan Sukarwo dalam bukunya yang berjudul *Tentara Bayaran AS Di Irak: Sebuah Konspirasi Neoliberal AS Untuk Memimpin Dunia* yang ditulis pada tahun 2009. Sukarwo mendukung pendapat penulis tentang struktur pemerintahan Amerika Serikat pada masa George W. Bush yang banyak diisi oleh para direktur perusahaan minyak Amerika sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Mereka menduduki pos-pos strategis di pemerintahan Bush seperti sebuah close recruitment. Dengan begitu banyaknya pengusaha yang duduk dalam kabinet Bush, Partai Republik disebut sebagai *The Party of Money*. Bahkan menurut Amy Goodman dan David Goodman, kabinet Bush adalah suatu bentuk oligarki korporasi (Goodman, 2005). Para pejabat yang tergolong oligarki politik seperti yang dikatakan Goodman meliputi: (1) Richard Bruce Cheney (Wakil Presiden Amerika Serikat). Dia adalah seorang mantan CEO *Halliburton Energy Service* periode

1995-2000; (2) Condoleeza Rice (Penasihat Keamanan nasional dan Menteri Luar Negeri). Dia adalah mantan anggota direksi *Chevron Corporation* selama satu dasawarsa; (3) Donald Rumsfeld (mantan menteri pertahanan Amerika Serikat) adalah seorang mantan wakil pemimpin perusahaan *Western Oil* yang bergerak di bidang Migas. Selain itu, dirinya adalah partner George W. Bush di perusahaan *Enron Energy* yang menjadi perusahaan pertama Amerika yang hancur ketika krisis keuangan tahun 2001 (Rusydan, 2008; (4) Spencer Abraham (Menteri Energi). Dia adalah mantan penerima donasi kampanye terbesar dari industri otomotif ketika masih menjadi senator; (5) Donald L. Evans (Menteri Perdagangan). Dia adalah mantan CEO dan direktur *Tom Brown Inc* yang bergerak dalam bidang migas; (6) Gale Norton (Menteri Dalam Negeri). Dia adalah mantan pengacara untuk *Delta Petroleum* (Sukarwo, 2009: 226-227).

Menurut penulis, mereka adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan untuk menguasai cadangan minyak Iran. Bagi Sukarwo, mereka adalah para pengusaha yang sedang memanfaatkan status mereka sebagai pemimpin dari sebuah negara paling kuat di dunia (Sukarwo, 2009).

#### II.4. Penyangkalan Iran Terhadap *Holocaust*

Penyangkalan Iran terhadap *Holocaust* merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi Amerika Serikat. Pemimpin Iran, Khamenei dan Mahmoud Ahmadinedjad sering mempublikasikan pertanyaan mengenai apakah *Holocaust* sesungguhnya pernah terjadi. Pada 24 April 2001, pemimpin Iran Khamenei bergabung dengan kelompok sejarawan revisionis dan sejarawan neo-Nazi terkemuka untuk menjadi pemimpin Iran pertama yang menungkapkan kesangsian mengenai *Holocaust*. Dalam pertemuan ini, Khamenei menyatakan bahwa ada bukti yang menunjukkan bahwa kaum Zionis memiliki hubungan erat dengan Nazi Jerman. Menurut Khamenei, kaum Zionis membesar-besarkan angka statistik terkait pembunuhan massal orang Yahudi untuk menghimpun simpati demi upaya menduduki Palestina (ISNA, 2001).

Bagi Khamenei, hal tersebut menunjukkan kekejian kaum Zionis dan hal tersebut juga membuktikan bahwa sejumlah besar orang non-Yahudi asal Eropa Timur telah dipaksa bermigrasi ke Palestina sebagai orang Yahudi. Tujuannya ialah mendirikan negara anti-Islam dengan samaran menyediakan tempat bagi

korban rasisme, sekaligus untuk menimbulkan perpecahan di dunia Islam (ISNA, 2001).

Pernyataan Khamenei didukung oleh Presiden Iran Mahmoud Ahmadinedjad. Ia menentang angka enam juta atas kematian orang Yahudi dalam peristiwa *Holocaust*. Ia menyatakan ketidakpercayaannya atas *Holocaust* ini. Pada tanggal 14 Desember 2005, Ahmadinedjad berpidato di Zahedan, kota kawasan barat daya Iran, salah satu daerah paling tertinggal yang mayoritas penduduknya beraliran Sunni. Pidato ini disiarkan secara luas oleh televisi Iran. Dalam pidatonya ini, Ahmadinedjad menyatakan bahwa orang-orang Eropa telah menciptakan mitos bernama *Holocaust* untuk membantu kaum Yahudi mendapatkan tanah Palestina (Naji, 2009).

Sikap penyangkalan Iran terhadap *Holocaust* telah menyinggung perasaan bangsa Israel. Sikap Iran yang melukai Israel ini pastinya memicu kemarahan Amerika Serikat. Dengan demikian, sikap penyangkalan Iran terhadap *Holocaust* ini bertujuan untuk menunjukkan sikap perlawanan Iran kepada bangsa Amerika yang selama ini selalu mencoba menghentikan program nuklirnya. Sikap ini juga sebagai bentuk provokasi agar seluruh negara-negara di Timur Tengah bersatu dengan Iran untuk mengusir Israel dari tanah Palestina sebagai bagian dari rencana Iran untuk menghilangkan segala bentuk pengaruh Amerika di Timur Tengah.

Dengan demikian, program pengembangan nuklir Iran, dukungan Iran kepada kelompok-kelompok teroris, peluang Iran untuk mendominasi kawasan minyak di Timur Tengah, dan penyangkalan Iran terhadap *Holocaust*, telah menjadi sebuah permasalahan besar bagi pemerintah George W. Bush.

Ketika permasalahan ini muncul ke permukaan, mekanisme politik di dalam pemerintah Bush terbuka lebar. Ketika mekanisme politik ini terbuka lebar, kelompok Neokonservatif memaksimalkan upaya untuk menerapkan agendanya di dalam pemerintah Bush dan upaya mereka membuahkan hasil. Selanjutnya,

agenda kelompok Neokonservatif ini menghasilkan sebuah kebijakan radikal di Iran. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya sebuah intervensi militer di Iran.

## II.5. Kelompok Neokonservatif

Dengan mengacu pada buku karya Ikenberry tahun 2001 yang berjudul *American Grand Strategy in the Age of Terror*, karakter kebijakan luar negeri Amerika Serikat terbagi menjadi dua yaitu *social welfare* dan *laissez faire*. *Social welfare* menekankan bahwa perlindungan kedaulatan Amerika adalah dengan membentuk pemerintahan demokrasi yang mandiri melalui sistem pemilihan umum. Immanuel Kant bahkan menyarankan bahwa pembentukan demokrasi di setiap negara adalah dengan membentuk pemerintahan Republik. Sedangkan *laissez faire* menekankan bahwa perlindungan kedaulatan Amerika adalah dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang berarti melakukan imperialisme (Ikenberry, 2001).

Kaum Neokonservatif termasuk kelompok yang menyerap karakter *laissez faire* dalam arah politik luar negerinya. Dari karakter *laissez faire* ini, mereka menjadi pengusung Neoliberalisme di Amerika Serikat. Neoliberalisme adalah sebuah paham yang menempatkan pasar sebagai satu-satunya hal yang mengatur kegiatan ekonomi. Orientasi kesejahteraan dalam Neoliberalisme menekankan pada perolehan keuntungan sebesar-besarnya. Hal itu senada dengan pendapat Peter L. Berger yang mengatakan bahwa kapitalisme merupakan kegiatan produksi yang diorientasikan untuk kepentingan pasar dan dilakukan oleh individu atau bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Berger, 1886).

Dalam Neoliberalisme, pihak swasta (korporasi) menjadi penguasa baru dalam sebuah negara dan terkadang kekuasaannya melebihi negara itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Martin Mergers dalam bukunya yang berjudul *Elites and Masses* pada tahun 1987 bahwa, “*The capitalist do not necessarily govern, in the sense of occupying political offices, but that they rule, by controlling political officials and institutions*” (Marger, 1987:42). Di sisi lain,

pemerintah menjadi pihak yang selalu memprioritaskan kepentingan korporasi besar tersebut dan tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Intervensi pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi justru difokuskan terhadap penyelamatan aset dan kepentingan pihak korporasi tersebut (Sukarwo, 2009).

Kaum Neoliberal menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh ekspansi dan profitabilitas dari sektor swasta, kebijakan pemerintah yang baru yang mendukung pengaktifan peran swasta dan masyarakat dalam perbaikan ekonomi (Sukarwo, 2009). Dalam konteks hubungan internasional, kaum Neoliberal mempunyai tujuan khusus yaitu *restoring the united States to its world leadership position* (*Ibid*, hlm.96). Kaum Neoliberal menganggap pentingnya usaha menjaga stabilitas keamanan internasional yang kemudian dianggap sama pentingnya dengan usaha pembaruan perekonomian (Sukarwo, 2009).

Di Amerika Serikat, paham Neoliberalisme mencapai puncaknya pada era Presiden Ronald Reagan. Pada era tersebut, peran dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian banyak dikurangi. Presiden Ronald Reagan terkenal dengan program ekonominya yang disebut *New Federalism*. Program tersebut merupakan pembenahan dari program *New Deal* yang diprakarsai di era Presiden Roosevelt pascaperang dunia kedua (Tindall, 1984). Pada masa selanjutnya, kebijakan ekonomi Reagan dalam *New Federalism* dikenal dengan sebutan *Reaganomics* (Heertz, 2003).

Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan besar dalam *Reaganomics*.

(1) Memberikan potongan pajak bagi kalangan pebisnis sebesar 30 persen selama tiga tahun; (2) Penghapusan berbagai macam hambatan perdagangan dan subsidi; (3) Mengurangi pengurangan federal sehingga negara mulai melepaskan diri dari tanggung jawab membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk publik, kecuali sektor pertahanan (Suroso, 1995: 27).

*Reaganomics* memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

(1) pengeluaran pemerintah federal dan pajak harus dipotong secara tajam; (2) Pemerintah akan memusatkan perhatiannya pada penyehatan

ekonomi Amerika jangka panjang dan tidak sekedar untuk mencoba memperlancar kegiatan di lingkungan bisnis; (3) upah dan harga akan ditentukan oleh kekuatan pasar, artinya kontrol atas upah dan harga semata-mata hanya untuk upaya-upaya pengendalian inflasi; (4) Deregulasi (*Ibid*, hlm.52).

Beberapa orang Neokonservatif di dalam pemerintahan Bush adalah mantan para pejabat tinggi selama masa kepresidenan Reagan. Pada masa pemerintahannya, tokoh-tokoh Neokonservatif seperti Paul Wolfowitz, Douglas Feith, Stephen Cambone, Dov Zakheim, John Bolton, Elliot Abrams, Zalmay Khalizad, Richard Perle, dan Lewis I. Libby berperan menerapkan ide-ide radikal. Colin Powell adalah anggota kelompok Neokonservatif yang menerapkan ide-ide *pre-emptive defense* di dalam pemerintahan Bush. Sementara itu, Donald Rumsfeld selalu memegang posisi Menteri Pertahanan baik dalam kepresidenan Reagan maupun kepresidenan Bush. Donald Rumsfeld dan Collin Powell adalah orang yang berada dibalik serangan Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003. Berikut ini adalah wajah-wajah dari anggota kelompok Neokonservatif di dalam pemerintahan George W. Bush yang berpengaruh.



Richard Armitage, adalah mantan Deputy Menteri Luar Negeri selama George W. Bush periode pemerintahan pertama (2001-2004). Ia memainkan peran sentral kunci pasca serangan 9/11. Ia melakukan negosiasi dengan Pakistan menjelang invasi ke Afghanistan pada bulan Oktober 2001. Pada era Reagan, ia menjabat sebagai Asisten Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Keamanan

Internasional. Ia memainkan peran penting dalam pelaksanaan NSDD 163 dan juga memastikan hubungan dengan militer Pakistan dan aparat intelijennya.



Paul Wolfowitz dari Departemen Luar Negeri bertanggung jawab atas tim kebijakan luar negeri yang beranggotakan, Lewis Libby, Francis Fukuyama dan Zalmay Khalilzad. Kelompok Wolfowitz juga terlibat dalam peletakkan dasar konseptual dukungan rahasia Amerika Serikat kepada partai-partai dan organisasi Islam di Pakistan dan Afghanistan.



Zalmay Khalilzad menulis draf *Defence Policy Guidance* (DPG) pada tahun 1992. Dalam DPG 1992 tersebut dituliskan bahwa Amerika Serikat harus membangun kekuatan militer dalam kapasitas besar untuk menata dunia. Kekuatan militer tersebut adalah untuk menata kawasan vital di Timur Tengah.

## **II.6. Kebijakan Radikal Kelompok Neokonservatif di Iran.**

Karakter *laissez faire* yang diserap oleh kelompok Neokonservatif, tertera dalam *Defence Policy Guidance* (DPG) tahun 1992 yang ditulis oleh Zalmay

Khalilzad (Mazaar, 2007). Dalam DPG 1992 tersebut dituliskan bahwa Amerika Serikat harus membangun kekuatan militer dalam kapasitas besar untuk menata dunia. Kekuatan militer tersebut adalah untuk menata kawasan vital di Timur Tengah (Mazaar, 2007). Kawasan vital di Timur Tengah yang dimaksud dalam DPG 92 ini adalah Irak dan Iran. Jadi, berdasarkan draf DPG 92, Iran merupakan negara yang harus ditata dengan menggunakan kekuatan militer. Beberapa orang Neokonservatif di dalam pemerintahan Bush memainkan peran kunci dalam merealisasikan draf DPG 92. Mereka adalah Paul Wolfowitz, Douglas Feith, Stephen Cambone, Dov Zakheim, John Bolton, Elliot Abrams, Zalmay Khalilzad, Richard Perle, dan Lewis I. Libby serta Colin Powell (Mazaar, 2007). Dengan demikian *Defence Policy Guidance* (DPG) tahun 1992 merupakan akar dari kelompok Neokonservatif untuk menerapkan intervensi militer terhadap Iran.

Neokonservatif terdiri dari sekumpulan orang-orang yang berkeinginan untuk menegakkan kepemimpinan Amerika Serikat di dunia. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama PNAC (*Project for New American Century*). Organisasi ini didirikan pada tahun 1997 sebagai sebuah organisasi untuk meningkatkan kepemimpinan global Amerika. Para pengurus proyek ini adalah William Kristol yang menjabat sebagai ketua serta para direktur seperti Robert Keagan, Devon Gaffney Cross, Bruce p Jackson serta John R. Bolton (Sukarwo, 2009). Dalam konteks menyerang Iran, PNAC membentuk sebuah komite untuk pembebasan rakyat Iran yang disebut dengan komite OIL (*Operation Iranian Liberation*) (Shoelhi, 2007). Nama OIL dimaknai sebagai usaha membebaskan Iran dari penguasa garis keras Iran.

Gagasan untuk membentuk PNAC berasal dari DPG 1992. Para penandatangan awal dokumen pendirian mereka adalah orang-orang yang berasal dari kalangan akademisi dan politikus. Beberapa orang di antaranya bahkan memegang jabatan penting dalam rezim Presiden Bush. Para penandatangan itu adalah Elliot Abrams, Gary Bauer, William J. Bennett, Jeb Bush, Dick Cheney, Elliot A. Cohen, Midge Decter, Paula Dobriansky, Steve Forbes, Aaron Friedberg, Francis Fukuyama, Frank Gaffney, Fred C. Ikle, Donald Kagan, Zalmay

Khalilzad, I Lewis libby, Norman Podhoretz, Dan Quayle, Peter W. Rodman, Stephen P. Rosen, Henry S. Rowen, Donald Rumsfeld, Vin Weber, George Wiegel, dan Paul Wolfowitz (Sukarwo, 2009)

Berikut ini adalah *statement of principles* dari PNAC (*Project for New American Century*) yang diusung kelompok Neokonservatif.

Ketika abad ke-20 akan berakhir, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan unggul di dunia. Setelah memimpin Barat meraih kemenangan dalam Perang Dingin, Amerika mendapatkan suatu kesempatan dan tantangan: apakah Amerika Serikat memiliki visi untuk membangun berdasarkan apa yang telah dicapai dalam dekade-dekade sebelumnya? Apakah Amerika Serikat telah memutuskan untuk membentuk abad baru yang menguntungkan bagi kepentingan-kepentingan dan prinsip Amerika? Yang kita butuhkan adalah militer yang kuat dan siap menghadapi baik tantangan masa kini maupun masa depan; sebuah kebijakan luar negeri yang tegas dan dengan tujuan tertentu untuk memperjuangkan prinsip-prinsip Amerika di luar negeri; dan kepemimpinan nasional yang menerima tanggung jawab global Amerika Serikat. Tentu saja, Amerika Serikat harus bijaksana dalam menggunakan kekuatannya. Tetapi, kita tidak dapat dengan aman menghindari tanggung jawab kepemimpinan global. Amerika Serikat memiliki peranan besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Jika kita melalaikan tanggung jawab, kita menghadapi tantangan pada kepentingan-kepentingan fundamental. Sejarah abad ke-20 semestinya telah mengajari kita bahwa adalah penting menciptakan sebuah lingkungan sebelum muncul krisis; dan mengatasi ancaman-ancaman sebelum ancaman itu berubah menjadi mengerikan (Sukarwo, 2009: 216-217).

Hubungan antara pemerintah Bush dengan kelompok Neokonservatif telah melahirkan suatu bentuk korporatisme. Wirawan Sukarwo dalam bukunya yang berjudul *Tentara Bayaran AS Di Irak* tahun 2009, menyebutkan bahwa bentuk hubungan antara pemerintahan sebuah negara dengan kelompok kepentingan disebut korporatisme negara atau pemerintahan korporatisme. Korporatisme adalah suatu pendekatan yang menekankan hubungan antara negara dan kelompok kepentingan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah korporatisme sering digabung dengan kata negara atau pemerintahan (Sukarwo, 2009).

Dalam buku yang ditulis oleh Nur Imam Subono pada tahun 2003 yang berjudul *Taktik Negara Menguasai Rakyat*, dituliskan beberapa definisi yang terkait dengan korporatisme dalam perspektif sistem pemerintahan. Menurut Subono, korporatisme merujuk kepada sebuah sistem pemerintahan jenis baru yang ditandai dengan kekuatan negara dan pengaturan kelompok-kelompok perwakilan kepentingan dalam masyarakat berdasarkan relasinya dengan negara (Subono, 2003).

Menurut Phillipe Schmitter, munculnya pemerintahan korporatisme merupakan jawaban sekaligus respons terhadap kebutuhan kapitalisme untuk menciptakan suatu rencana atau aransemen politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi (Schmitter, 1974).

Menurut Guilermo O'Donnel, munculnya pemerintahan korporatisme mengacu pada awal perkembangan kapitalisme saat negara sangat dominan. Peran negara sangat otonom dalam mendistribusikan kekuasaan kepada masyarakat dan arah pembangunan ekonomi. O'Donnel memiliki teori rezim birokratik otoriter sebagai eksis dari model pemerintahan korporatisme. Menurutnya, ciri-ciri dari rezim birokratik otoriter adalah sebagai berikut.

- (1) Penyelenggaraan negara didominasi oleh koalisi militer, teknokrat sipil, dan perusahaan swasta besar;
- (2) Menerapkan stabilitas dengan pendekatan kekerasan dalam mengamankan program ekonomi;
- (3) peniadaan politik dengan melakukan kontrol yang ketat untuk mengeliminasi aktivitas politik dan menghapus lembaga demokrasi politik;
- (4) Sistem ekonominya bertolak pada akumulasi modal yang cenderung oligopolistik dari kepentingan modal pribadi atau lembaga-lembaga negara;
- (5) Depolitisasi dan mengurangi isu politik yang kemudian menjadi masalah teknis dan hanya dapat dipecahkan antara para pejabat (O'Donnel, 1979: 290-294).

Dengan melihat teori-teori di atas, penulis dapat melihat bagaimana Amerika Serikat menjalankan pemerintahannya di era Bush. Hubungan yang kuat antara kelompok Neokonservatif dan pemerintah Bush melahirkan sebuah bentuk pemerintahan korporatisme. Dengan hubungan yang kuat tersebut, maka anggota-

anggota kelompok Neokonservatif menjadi anggota di dalam kabinet pemerintahan Bush.

## **II.7. Perlunya Penggunaan Intervensi Militer Di Iran**

Berikut ini adalah beberapa anggota kelompok Neokonservatif yang berpendapat di media tentang perlunya penggunaan intervensi militer Amerika di Iran.

Marc Perelman pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa kaum Neokonservatif di dalam dan di luar pemerintahan telah mendesak upaya aktif guna memungkinkan penggantian rezim di Iran (*Forward*, 2003). Sementara itu, William Kristol menginformasikan bahwa pembebasan Irak adalah perang besar pertama demi masa depan Timur Tengah, namun perang besar berikutnya akan ditujukan ke Iran (*Weekly Standard*, 2003).

Jim Lobe pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa kaum Neokonservatif saat ini sedang memusatkan perhatiannya yang utama pada pergantian rezim di Iran dan upayanya ini telah membuahkan hasil yang besar (*Inter Press Service*, 2003). Pendapat Jim Lobe senada dengan pendapat William Arkin. Dalam kolom online *The Washington Post*, analisis pertahanan William Arkin mengungkapkan bahwa Departemen Pertahanan Amerika atau Pentagon telah membuat rencana penyerangan terhadap Iran sejak 2003. Menurut Arkin, rencana itu dijalankan langsung atas perintah mantan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld dan mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Richard Myers. Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional Wakil Presiden AS John Hannah, sebagaimana dikutip *The Washington Post* (11/2), mengatakan bahwa perang dengan Iran bisa meletus tahun ini. Maksud John Hannah adalah Amerika Serikat kemungkinan besar menyerang Iran tahun 2003 (*Washington Post*, 2003).

Michael Leeden dalam *National Review Online* berpendapat bahwa tidak ada lagi waktu untuk solusi diplomatik di Iran. Menurutnya, perang Iran akan memberikan sebuah kemenangan yang dapat dikenang oleh Amerika Serikat

sebab bangsa Iran secara terbuka membenci rezim Amerika dan bersemangat untuk memerangnya (*National Review Online*, 2003).

Michael Rubin dari *American Enterprise Institute* (AEI) mengatakan kepada *New York Daily News* pada 3 Oktober 2006, *to end Iran Standoff, Plan for War.*” Anggota AEI lainnya, Joshua Muravchik mengatakan bahwa presiden Bush akan perlu mengebom fasilitas nuklir Iran sebelum menyelesaikan masa jabatannya.” Selain AEI, *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) juga berperan dalam menyebarkan ancaman dari Iran dan mengedepankan opsi militer. Konferensi tahunannya selama dua tahun terakhir telah menempatkan masalah Iran di urutan teratas dan menekankan bahwa penghentian program nuklirnya tidak dapat ditawar (Hoffman, 1993).

Richard Perle, pada bulan January 2007 mengatakan, saya tidak ragu bahwa andai dalam masa jabatan presiden Bush jelas-jelas Iran akan berhasil menguasai senjata nuklir, ia tidak akan ragu memerintahkan penyerangan. Norman Podhoretz pada 30 Mei 2007 menerbitkan artikel di *Wall Street Journal* versi online berjudul *“The Case for Bombing Iran: I hope and Pray That Bush will do it.”* AIPAC juga memainkan peranan utama dalam menyebarkan ancaman dari Iran dan mengedepankan opsi militer. Dalam *The New York Post*, senator Hillary Clinton disambut protes ketika dalam sebuah pertemuan AIPAC ia mengusulkan bahwa rasanya masuk akal kalau berunding dahulu dengan Iran sebelum menerapkan upaya-upaya lebih keras (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Daniel Pipes dari *The Middle East Forum* dan Patrick Clawson dari WINEP menerbitkan sebuah artikel di *Jerusalem Post* pada 20 Mei 2003 berjudul *“Turn Up The Pressure on Iran”* (*Jerusalem Post*, 2003). Mereka meminta Presiden Bush mendukung Mojahedin-e Khalq, kelompok yang berbasis di Irak yang tengah berusaha menggulingkan rezim di Teheran tetapi pemerintah Amerika Serikat telah terlanjur memasukkan kelompok ini ke dalam daftar organisasi teroris. Sementara itu, Lawrence Kaplan menulis di *New Republic* pada 2003 bahwa Amerika Serikat perlu bersikap lebih tegas kepada Iran terkait dengan

program nuklirnya, yang menurut perhitungannya lebih maju daripada yang telah disadari oleh para pembuat kebijakan di Amerika (*New Republic*, 2003).

Pada tanggal 6 Mei 2001, *American Enterprise Institute* menjadi sponsor dalam konferensi tentang masa depan Iran dengan *The Foundation for the Defense of Democracies* dan *The Hudson Institute*. Para pembicara dalam acara itu adalah Bernard Lewis, Senator Sam Brownback, penasihat senior IDF dan mantan koordinator pemerintah Israel untuk Lebanon selatan Uri Lubrani, Morris Amitay dari *Jewish Institute for National Security Affairs* dan mantan direktur eksekutif AIPAC, Michael Ledeen, Reuel Marc Gerecht dari AEI, dan Meyrav Wurmser dari *The Hudson Institute*. Pertanyaan utama yang diajukan dalam panel itu jelas sekali yaitu: “Langkah apa yang dapat diambil oleh Amerika Serikat untuk mewujudkan demokratisasi dan penggantian rezim di Iran?” Jawabannya dapat diramalkan: tiap pembicara menyerukan agar Amerika Serikat berbuat jauh lebih banyak untuk menggulingkan Republik Islam dan menggantinya dengan sebuah negara demokrasi (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Dengan demikian permasalahan yang menyangkut pengembangan nuklir Iran, dukungan Iran kepada kelompok teroris, penyangkalan pemimpin Iran terhadap *Holocaust*, dan peluang Iran untuk mendominasi kawasan minyak di Timur Tengah, telah membuat kelompok Neokonservatif mengupayakan sebuah agenda yang menghasilkan kebijakan luar negeri Amerika yang radikal di Iran. Pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai sudut pandang kelompok Neokonservatif yang membuatnya menerapkan kebijakan radikal di Iran.

## BAB III

### SUDUT PANDANG KELOMPOK NEOKONSERVATIF

Dalam merealisasikan DPG 92, dengan mengacu kepada buku *Evolusi Hak Dalam Teori Liberal* yang ditulis Ian Shapiro pada tahun 1986, kelompok Neokonservatif mengacu pada ideologi Hobbesian Liberalisme (Shapiro, 1986). Dengan mengacu kepada karya Russell Walter pada tahun 2002 yang berjudul *Special Providence*, dalam merealisasikan DPG 92, kelompok Neokonservatif juga mengacu pada mazhab Jacksonian, dan mazhab Hamiltonian (Mead, 2002). Berikut ini akan penulis jelaskan tentang ideologi Hobbesian Liberalisme, mazhab Jacksonian dan mazhab Hamiltonian yang menjadi sudut pandang kelompok Neokonservatif untuk menerapkan intervensi militer terhadap Iran.

#### III.1 Hobbesian Liberalisme

Dalam bukunya yang berjudul *Evolusi Hak Dalam Teori Liberal*, Ian Shapiro pada tahun 1986 mengemukakan pendapatnya mengenai Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah anggota kelas penguasa yang dihinggapi ketakutan pada rakyat jelata yang tersebar luas pada masa pemerintahan Tudor dan pada awal masa pemerintahan Stuart di Inggris. Ia memiliki rasa takut lapisan atas pada rakyat jelata. Bagi Hobbes, rakyat jelata berpotensi menghancurkan kehidupan anggota kelas penguasa. Ketakutan ini menyebabkan dirinya banyak menulis sejumlah teori tentang kehadiran penguasa absolut dan menjadikan dirinya seorang filsuf terkenal di Amerika yang pemikiran-pemikirannya banyak dipakai oleh ahli politik Amerika pada abad ke-19 (Shapiro, 1986).

Dalam pandangan Thomas Hobbes, setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak hidup ini selalu terancam oleh kekacauan yang selalu terjadi. Menurut Hobbes, kekacauan yang mengancam hak hidup ini berasal dari rakyat jelata. Rakyat jelata merupakan kekuatan besar yang memiliki potensi bahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. Bagi Hobbes, rakyat jelata hanya dapat

ditundukan oleh penguasa absolut. Demi keberlangsungan hidup manusia, penguasa absolut harus ada. Pandangan Hobbes mengenai penguasa absolut ini memang memiliki dampak otoriter, akan tetapi tujuan dari kehadiran penguasa absolut ini dalam pandangan Hobbes adalah untuk menjamin hak hidup manusia. Kehadiran sang penguasa absolut adalah untuk menghilangkan segala bentuk kekacauan yang berasal dari rakyat jelata (Shapiro, 1986).

Menurut Hobbes, kekuasaan penguasa absolut itu mutlak. Kekuasaan penguasa absolut ini harus dijalankan untuk mengatur interaksi individu-individu. Oleh karenanya kebebasan rakyat jelata terbatas pada hal-hal yang ditetapkan oleh penguasa absolut. Berbagai kewenangan yang dijalankan penguasa absolut terhadap rakyat jelata merupakan jaminan hak hidup bagi individu-individu. Maka dari itu Thomas Hobbes memberikan kekuasaan tidak terbatas pada penguasa absolut dan bahkan menyetujui cara pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa absolut. Menurut Hobbes, tanpa kontrol yang kuat dari penguasa absolut, masyarakat akan terjerumus ke dalam kekacauan. Maksud Hobbes, tanpa adanya kekuasaan tegas dan otoritatif untuk menegakan aturan dan norma yang perlu bagi interaksi sosial, masyarakat akan kacau (Shapiro, 1986).

Menurut pendapat penulis, kelompok Neokonservatif menafsirkan penguasa absolut Hobbes sebagai Amerika Serikat dan menafsirkan rakyat jelata Hobbes sebagai Iran. Pasca serangan 9/11, hak hidup warga Amerika selalu terancam oleh segala bentuk kegiatan terorisme. Kegiatan terorisme yang mengancam hak hidup warga Amerika ini berasal dari Iran. Iran merupakan kekuatan besar yang memiliki potensi bahaya bagi keberlangsungan hidup manusia karena mendukung kegiatan terorisme, membangun program nuklir, menyangkal *Holocaust*, dan berpotensi menguasai kawasan minyak Timur Tengah. Bagi penulis, hal-hal tersebut telah menjadi permasalahan bagi Amerika Serikat.

Berdasarkan penafsiran teori Thomas Hobbes di atas, maka Iran hanya dapat ditundukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat harus memainkan peran

kepemimpinan globalnya. Kepemimpinan global Amerika memang memiliki dampak otoriter, akan tetapi tujuan dari kepemimpinan Amerika ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Inilah yang membuat kelompok Neokonservatif memberikan kekuasaan tidak terbatas pada Amerika melalui tindakan unilateral dalam menjalankan perannya di dunia dan menyetujui tindakan pemaksaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Dengan demikian unilateralisme yang dijalankan oleh Amerika dimaksudkan untuk menghilangkan segala permasalahan yang telah disebutkan di atas.

Peran kepemimpinan global Amerika Serikat yang direalisasikan melalui strategi unilateralisme telah mendorong kalangan Neokonservatif untuk melakukan intervensi terhadap Iran dengan doktrin *preemption* (serangan sebelum kekuatan lawan terwujud). Doktrin *preemption* ini berasal dari mazhab Jacksonian dan mazhab Hamiltonian. Kelompok Neokonservatif telah mengadopsi ide-ide *preemption* dari kedua mazhab ini. Berikut ini penjelasan mazhab Jacksonian yang menjadi sudut pandang kaum Neokonservatif dalam doktrin *preemption*nya.

### **III.2 Mazhab Jacksonian**

Dalam bukunya yang berjudul *Special Providence* pada tahun 2002, Russel Walter Mead mengemukakan pendapatnya mengenai mazhab Jacksonian. Pada era Perang Dunia II, Amerika melakukan serangan udara terhadap Jepang dan Jerman. Di Jepang, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa bom atom ini menewaskan lebih dari 900.000 orang Jepang (Mead, 2002). Di Jerman, Amerika menjatuhkan bom di Hindenburg. Peristiwa ini menewaskan beberapa warga Jerman dalam jumlah yang besar dan meruntuhkan jembatan Hindenburg (Pitaya, 2009).

Kemudian pada era Perang Dingin, Amerika melakukan serangan udara ke wilayah Asia. Amerika menjatuhkan bom atom di wilayah Korea Utara yang menewaskan sejumlah besar orang Korea Utara dan Cina di wilayah tersebut. Diperkirakan korban tewas dari pihak Korea Utara berjumlah kurang lebih 10 juta

orang. Amerika juga menjatuhkan bom atom di Vietnam. Peristiwa tersebut menewaskan 365.000 warga Vietnam (Gaddis, 1982). Serangan udara yang dilakukan Amerika di atas dirancang oleh kelompok pemikiran Jacksonian. Menurut Mead, setiap kali Amerika terlibat dalam peperangan dunia, mahzab Jacksonian dipastikan berada di balik aksi-aksi serangan militer tersebut (Mead, 2002).

Pemikiran mahzab Jacksonian ini dipelopori oleh Andrew Jackson. Andrew Jackson adalah seorang yang berasal dari daerah perbatasan Barat (*frontier*) pertama yang menduduki Gedung Putih. Di tengah kecamuk Perang 1812, Jackson yang waktu itu bertugas memimpin milisi Tennessee dikirim ke Alabama selatan. Di Alabama Selatan, ia menumpas perlawanan suku Indian Creek dengan kejam. Kemudian suku Creek menyerahkan 2/3 dari tanah mereka kepada Amerika Serikat. Jackson juga kemudian mengusir suku Indian Seminole dari tempat perlindungan mereka di Florida yang dimiliki Spanyol (Tindall, 1984).

Ketika Jackson menjadi presiden Amerika Serikat, emas ditemukan di tanah suku Cherokee pada tahun 1829. Maka, Jackson memaksa suku Cherokee untuk meninggalkan wilayah tersebut dengan berjalan kaki ke Oklahoma yang sangat jauh jaraknya pada tahun 1838. Banyak yang meninggal dalam perjalanan tersebut karena penyakit dan kekurangan makan. Hal inilah yang menyebabkan Andrew Jackson dikenal dengan sosok kejam yang senang melakukan peperangan. Dengan demikian, Andrew Jackson adalah seorang presiden Amerika yang menekankan pentingnya penggunaan intervensi militer dalam melaksanakan kebijakannya (Tindall, 1984).

Apabila dikaitkan dengan permasalahan Iran, sudut pandang Andrew Jackson digunakan kelompok Neokonservatif untuk melindungi Amerika dari dampak ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam pandangan Liberalisme disebutkan bahwa seseorang dapat menggunakan kebebasannya sepanjang hal itu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Bila dikaitkan dengan

permasalahan Iran, pandangan Liberalisme tersebut dapat ditafsirkan bahwa pengembangan nuklir Iran, dukungan Iran kepada kelompok teroris, penyangkalan pemimpin Iran terhadap *Holocaust*, dan peluang Iran untuk mendominasi kawasan minyak di Timur Tengah, telah mengganggu kebebasan Amerika. Untuk itu, intervensi militer seperti dalam pandangan mahzab Jacksonian sangat diperlukan. Jadi, rencana intervensi militer yang diusung kelompok Neokonservatif terhadap Iran dapat dipastikan berasal dari mahzab Jacksonian.

Intervensi militer yang diusung mahzab Jacksonian inisebenarnya merujuk pada Amandemen II Konstitusi Amerika. Di dalam Amandemen II Konstitusi disebutkan bahwa “suatu pasukan milisi yang teratur baik, karena penting demi keamanan suatu Negara Bagian yang bebas, hak rakyat untuk menyimpan dan membawa senjata, tidak boleh dilanggar”(Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2004).

Dalam hubungan internasional, Jacksonian menafsirkan pernyataan Konstitusi di atas bahwa Amerika Serikat berhak menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kedaulatannya. Intervensi militer yang dilakukan Amerika adalah sebagai respon bahwa negara lain telah menggunakan kedaulatannya akan tetapi kedaulatannya ini mengganggu kedaulatan Amerika Serikat. Atas dasar inilah mahzab Jacksonian mendorong Amerika Serikat untuk melakukan intervensi militer terhadap negara lain. Sebagai tambahan, dalam pandangan Jacksonian, pemerintah Amerika harus bertindak secara unilateral dalam menggunakan kekuatannya militernya. Ini berarti pemerintah Amerika dalam melakukan peperangan dengan negara lain, harus melakukannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Aliansi internasional dan koalisi peperangan tidak diperlukan di sini (Mead, 2002).

Jadi, intervensi militer yang dilakukan Amerika Serikat adalah dalam rangka melindungi Amerika dari negara-negara lain. Selain untuk melindungi wilayah Amerika dari ancaman pihak asing, kekuatan militer Amerika juga

digunakan terhadap pihak asing yang melakukan tindak kejahatan yang menewaskan sejumlah besar warga Amerika.

Sebagai contoh, Woodrow Wilson terlibat dalam Perang Dunia I karena kapal-kapal Jerman telah menyerang kapal-kapal Amerika di perairan internasional. Kemudian Franklin D. Roosevelt terlibat dalam Perang Dunia II karena Jepang, Jerman, dan Italia melakukan ekspansi teritorial menuju wilayah kedaulatan Amerika. Dalam Perang Dunia II, Jepang melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor (Tindall, 1984).

Sementara itu, George W. Bush terlibat dalam perang Irak karena Irak terlibat dalam kegiatan terorisme yang menghancurkan gedung *World Trade Centre* dan Pentagon Amerika. Sementara itu, pada masa Perang dunia II, Amerika Serikat harus menjatuhkan bom atom di kota-kota Jepang. Hal ini dikarenakan Jepang telah melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor yang menewaskan sejumlah besar warga Amerika dan merusak sebagian besar infrastruktur Amerika di sana.

Pada tanggal 7 Desember pesawat-pesawat Jepang yang lepas landas dari kapal induk menyerang armada Pasifik AS di Pearl Harbor, Hawaii, dalam serangan tiba-tiba yang memporakporandakan sembilan belas kapal, termasuk lima kapal perang dan swkitar 150 pesawat Amerika Serikat. Lebih dari 2.300 tentara, pelaut, dan orang sipil tewas. Aksi Jepang ini merupakan suatu tindakan kejahatan dan tergolong ke dalam tindakan yang tidak menghormati kedaulatan Amerika (Tindall, 1984).

Maka pada tanggal 6 Agustus 1945, Presiden Franklin Roosevelt memerintahkan pesawat *Enola Gay* menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima, Jepang. Ledakan bom atom tersebut telah membunuh 70.000 hingga 100.000 penduduk dan menghancurkan kota hingga sejauh 13 kilometer. Tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Daya hancurnya yang luar biasa membunuh 40.000 warga sipil dan menghancurkan kota hingga sejauh 7 kilometer (Tindall, 1984).

Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Korea Utara dan Vietnam pada tahun 1953. Ketika Amerika Serikat mencoba untuk membebaskan warga Asia dari aksi brutal Uni Soviet, sejumlah besar pasukan Cina dan Korea Utara mengepung pasukan Amerika dari berbagai sudut. Serangan pasukan Cina dan Korea Utara telah menewaskan seluruh pasukan Amerika yang sedang berjuang untuk membebaskan warga Asia tersebut. Hal tersebut merupakan suatu tindakan kejahatan yang harus diperangi Amerika. Maka pada tahun 1953, Presiden Harry S. Truman memerintahkan Jendral McArthur untuk menjatuhkan bom atom di sebagian wilayah Korea Utara dan sebagian wilayah Vietnam (Gaddis, 1982).

Jadi, berdasarkan pandangan Jacksonian, maka aksi-aksi yang mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur Amerika dan kematian pada warga negaranya merupakan tindakan yang harus diselesaikan dengan menggunakan kekuatan militer. Dengan demikian, berdasarkan sudut pandang mazhab Jacksonian ini, maka dukungan Iran terhadap aksi-aksi teroris yang mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur Amerika dan kematian pada warga negaranya merupakan tindakan yang harus diselesaikan dengan menggunakan kekuatan militer. Jadi, doktrin *preemption* kelompok Neokonservatif berasal dari Mazhab ini. Selain berasal dari mazhab Jacksonian, doktrin *preemption* kelompok Neokonservatif juga berasal dari mazhab Hamiltonian. Berikut ini akan dijelaskan mengenai mazhab Hamiltonian yang menjadi sudut pandang doktrin *preemption* kelompok Neokonservatif.

### **III.3 Mahzab Hamiltonian**

Dalam bukuyang berjudul *Special Providence* pada tahun 2002, Russel Walter Mead mengemukakan pendapatnya mengenai mazhab Hamiltonian. Menurut Mead, kelompok pemikiran Hamiltonian selalu menekankan pentingnya melakukan kerjasama perdagangan dengan bangsa-bangsa Eropa melalui jalur pelayaran (Mead, 2002). Berdasarkan pemikiran ini, Amerika sering mengadakan segala macam bentuk perdagangan melalui laut.

Pemikiran mahzab Hamiltonian ini dipelopori oleh Alexander Hamilton. Alexander Hamilton adalah seorang menteri keuangan pada era kepresidenan George Washington. Ia adalah seorang yang menginginkan sebuah pemerintah pusat yang kuat yang bertindak untuk kepentingan perdagangan dan industri. Ia membuat rancangan pemerintahan yang efektif (Tindall, 1984).

Bagi Hamilton, Amerika harus memberi pinjaman untuk perkembangan industri, kegiatan perdagangan, dan untuk operasi pemerintah. Untuk itu ia merancang adanya sebuah Bank Amerika yang menyokong kas negara dan menempatkan kredit dari pemerintah federal untuk membangun perusahaan dan memberikan semua keringanan pajak yang diperlukan sehingga memacu perdagangan dan industri serta menciptakan para pengusaha andal yang mendukung sepenuhnya pemerintah nasional. Ia juga menganjurkan adanya pajak impor untuk melindungi perkembangan industri nasional yang bersifat kompetitif (Tindall, 1984).

Bagi Hamilton, pemerintah federal memiliki wewenang kepada Kongres untuk membuat semua undang-undang yang bisa diperlukan untuk menjalankan kekuasaan seperti memungut dan mengumpulkan pajak, membayar utang-utang, dan meminjam uang. Sebuah bank nasional secara materiil akan membantu pelaksanaan fungsi-fungsi ini secara efisien. Maka Kongres harus mendirikan bank semacam itu (Tindall, 1984). Dengan demikian, Alexander Hamilton adalah seorang federalis yang menekankan pentingnya industri dan perdagangan bagi Amerika termasuk perdagangan ke luar negeri.

Keberhasilan perdagangan Amerika melalui jalur laut telah menyulut sebagian besar negara Eropa terlibat persaingan untuk menguasai laut. Laut menjadi kompetisi negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa bersaing untuk menguasai laut karena barang siapa yang menguasai laut akan menguasai lalu lintas laut dan barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut akan menguasai dunia. Ketika perdagangan Amerika berkembang pesat, beberapa negara Eropa berusaha untuk menghalangi kapal-kapal Amerika melintasi laut. Jerman adalah

salah satu negara Eropa yang terkuat dan paling menentang pelayaran Amerika di laut lepas.

Pemimpin militer Jerman bahkan dalam usahanya untuk menghalangi kebebasan Amerika di laut, pada bulan Februari 1915, menyerukan pengumuman bahwa mereka akan menyerang semua kapal pelayaran niaga di perairan kepulauan Inggris. Akan tetapi, Presiden Woodrow Wilson tidak terpengaruh dengan seruan Jerman tersebut dan memperingatkan bahwa Amerika akan terus menggunakan haknya sebagai negara netral yang dapat terus mengadakan perdagangan laut lepas. Ketika kapal dagang Amerika melintasi perairan kepulauan Inggris, angkatan laut Jerman menyerang kapal tersebut dan membunuh warga Amerika di kapal tersebut. Presiden Wilson menyatakan bahwa Amerika akan menuntut Jerman atas hilangnya kapal-kapal Amerika (Tindall, 1984).

Tak lama kemudian pada tahun 1915, kapal Inggris Lusitania diserang armada laut Jerman dan seribu dua ratus orang di dalamnya tewas tenggelam. Seratus dua puluh delapan orang diantaranya adalah warga negara Amerika. Sebagai tanggapan atas hilangnya kapal-kapal Amerika dan tewasnya warga Amerika di laut lepas oleh serangan Jerman, maka Presiden Wilson memutuskan hubungan dengan Jerman. Akan tetapi pada 22 Januari 1917, armada laut Jerman kembali menenggelamkan lima kapal Amerika di perairan lepas (Tindall, 1984).

Menyaksikan kejadian-kejadian tersebut, berdasarkan informasi yang ditulis oleh Russel Walter Mead dalam bukunya yang berjudul *Special Providence* pada tahun 2002, kelompok pemikir Hamiltonian berasumsi bahwa manusia secara hakiki memiliki tabiat jahat dan tidak sempurna sehingga tak ada satupun tatanan masyarakat yang mampu mengatasinya. Kelompok pemikir Hamiltonian juga menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang serakah dan hatinya selalu dipenuhi dengan kejahatan (Mead, 2002).

Menurut Hamiltonian, dalam berhubungan dengan negara lain, kelompok manusia ini selalu melakukan cara apapun terhadap negara lain untuk memenuhi

ambisi kepentingannya. Konflik di antara negara bangsa untuk meraih kepentingan-kepentingannya pun menjadi tak terelakansehingga konflik senjata di dunia pun tidak dapat dihindarkan (Waltz, 1959).

Sudut pandang Hamiltonian didukung oleh pendapat Immanuel Kant, Spinozadan Rousseau. Dalam bukunya yang berjudul *Man The State And War* yang ditulis pada tahun 1959 oleh Kenneth Waltz, ImmanuelKant berpendapat bahwa konflik yang terjadi di antara negara bangsa dikarenakan manusia sebagai makhluk hidup dikuasai oleh *sense* dan *understanding*. Menurut Kant, seandainya manusia hanya memiliki *understanding*, ia akan selaras dengan nilai yang berlaku secara universal, mengikuti apa yang harus diikuti. Sementara itu, Kenneth Waltz sendiri berpendapat bahwa ketika manusia hanya bertumpu pada *sense* maka nafsu akan menguasai akal sehat yang diikuti dengan konflik dan kekerasan (Waltz, 1959).

Selain itu, dalam buku tersebut, Spinoza juga berpendapat bahwa kekerasan timbul karena ketidaksempurnaan manusia. Nafsu mengalahkan nalar, seharusnya manusia dapat bekerja sama dengan pihak lain secara harmonis. Cara mengakhiri konflik tergantung pada masing-masing individu. Perang antar negara sulit dihindari karena hal ini merupakan hakikat manusia. Secara alamiah, menurut Spinoza, manusia dikuasai oleh insting, nafsu dan kebebasan yang terpadu dalam kekuatan individu. Kesepakatan maupun hukum keadilan tidak efektif bagi mereka (Waltz, 1959).

Masih dalam buku *Man The State And War*, Spinoza juga berpendapat bahwa manusia pada hakikatnya memiliki watak dan kebiasaan yang mereka peroleh dari masyarakat dengan cara tidak terpaksa. Eksistensi manusia sebelum terstruktur dalam suatu masyarakat tidak memiliki sifat arogan dan iri hati karena ia belum memiliki referensi perbandingan. Bila terdapat kesempatan yang menjadikan mereka bersatu, kesadaran akan kelemahan dan ketidakberdayaan membuat mereka saling menjatuhkan (Waltz, 1959).

Dalam buku *Man The State And War* ini, Rousseau juga berpendapat bahwa manusia cenderung mempertahankan kebebasannya karena manusia memiliki hak untuk memperoleh apa yang mungkin ia peroleh. Menurutnya, karena kesepakatan maupun hukum keadilan tidak efektif, maka tak ada suatu kekuasaan atau otoritas tertentu yang mampu mengatasi konflik(Waltz, 1959).

Pemikiran-pemikiran di atas membuat Hamiltonian berasumsi bahwa solusi untuk permasalahan tersebut adalah kekuatan militer. Penggunaan kekuatan militer sangat diperlukan untuk melindungi kebebasan perdagangan Amerika di laut lepas. Amerika harus terlibat dalam peperangan untuk melindungi kebebasannya di perairan bebas (Mead, 2002). Atas dasar pemikiran tersebut, maka Presiden Wilson meminta Konggres untuk segera menggunakan kekuatan militernya terhadap Jerman.

Selanjutnya dalam pemikiran Hamiltonian, dengan kekuatan militer, selain untuk melindungi kebebasan di perairan internasional, Amerika Serikat juga dapat memperluas wilayah perdagangannya hingga ke Pasifik dan Atlantik. Kekuatan militer ini akan digunakan untuk melindungi kapal-kapal dagang Amerika di laut dari serangan negara lain atau serangan kelompok perompak pada saat melakukan perluasan perdagangan ke wilayah Pasifik dan Atlantik. Kekuatan militer juga dapat digunakan Amerika untuk mendapatkan wilayah-wilayah perairan strategis di dunia (Mead, 2002). Berdasarkan sudut pandang Hamiltonian ini, banyak kapal dagang Amerika yang melakukan perdagangan hingga ke Pasifik dan Atlantik(Mead, 2002). Atas sudut pandang Hamiltonian ini juga, terusan Panama berada dalam kekuasaan Amerika.

Pemikiran-pemikiran mahzab Hamiltonian tersebut kemudian diadopsi oleh kelompok Neokonservatif. Berdasarkan mahzab Hamiltonian, kelompok Neokonservatif mendorong pemerintah Bush untuk mengirimkan kapal induk beserta sejumlah besar pasukan Amerika Serikat ke perairan Teluk Persia (Naji, 2009). Tujuannya adalah untuk menguasai perairan Teluk Persia yang diketahui

memiliki nilai strategis sebagai jalur perdagangan dan sebagai jalur untuk memudahkan Amerika Serikat melakukan serangan militer terhadap Iran.

Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ideologi Hobessian Liberalisme, mazhab Jacksonian, dan mazhab Hamiltonian telah membentuk pola pikir kelompok Neokonservatif untuk melakukan intervensi militer kepada Iran. Berikut ini akan dijelaskan pula mengapa kelompok Neokonservatif lebih memilih melakukan intervensi militer daripada intervensi pemerintahan demokratis terhadap Iran.

Fareed Zakaria dalam bukunya yang berjudul *Bangkitnya Demokrasi tak Liberal* berpendapat bahwa demokrasi liberal ditandai bukan hanya oleh pemilu yang bebas dan adil tetapi juga oleh penegakan undang-undang, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan atas kebebasan dasar untuk berbicara, berkumpul, memeluk agama, dan hak milik pribadi. Jadi, demokrasi dan liberal merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. Akan tetapi pada kenyataannya demokrasi terpisah dari liberal di sebagian besar negara-negara di dunia. Bagi Zakaria, demokrasi di sebagian besar negara-negara di dunia tumbuh subur namun kebebasan konstitusional tidak (Zakaria, 1997). Dengan kata lain, menurut Roger Kaplan, setengah dari negara yang sedang mengalami demokratisasi di dunia sekarang ini adalah negara demokrasi yang tak liberal (Kaplan, 1997).

Menurut Zakaria, apabila sebuah negara menyelenggarakan pemilu yang kompetitif dan multipartai, negara tersebut disebut demokratis. Namun apabila pemilu tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan adil, maka negara tersebut tidak bisa disebut liberal. Pemilu yang tidak terbuka dan tidak adil membuat pemerintah yang dihasilkan oleh pemilu seringkali bertindak korup, picik, tidak bertanggungjawab, didominasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, dan tidak mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang dituntut oleh kebaikan publik. Dalam sebagian besar sejarah manusia, demokrasi yang tak liberal menghasilkan pemerintahan diktator, totaliterisme, dogma-dogma agama, dan absolutisme monarki yang mengancam kehidupan individual, kebebasan, dan kebahagiaan

manusia (Zakaria, 1997). Dengan kata lain, demokrasi tanpa liberalisme konstitusional akan mendatangkan erosi kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, perpecahan etnis, dan bahkan perang. Bagi Zakaria, setiap gelombang demokrasi di sebagian besar negara-negara di dunia selalu diikuti dengan kemunduran (Zakaria, 1997).

Berikut ini adalah contoh-contoh demokrasi tak liberal yang diungkapkan Faeed Zakaria. Setelah berkuasa, Fujimori membubarkan lembaga legislatif di Jepang dan menanggukkan konstitusi. Selain Fujimori, ada juga Askar Akayev dari Kyrgyzstan yang terpilih dengan 60 persen suara, mengusulkan untuk mempertinggi kekuasaannya dalam sebuah referendum yang disahkan pada 1996. Kekuasaannya meliputi pengangkatan semua pejabat tinggi kecuali perdana menteri. Ia juga dapat membubarkan parlemen jika parlemen menolak tiga di antara calon-calonnya untuk jabatan itu (Zakaria, 1997).

Sementara itu, pada 1993 Boris Yeltsin menyerang Parlemen Rusia. Kemudian ia membubarkan Mahkamah Konstitusi, membongkar sistem pemerintah lokal, dan memecat beberapa gubernur provinsi. Banyak pemilihan umum yang digelar setelah runtuhnya komunisme di Uni Soviet dan Yugoslavia dimenangkan oleh kaum separatis nasionalis dan mengakibatkan pecahnya negara-negara tersebut (Zakaria, 1997). Hal tersebut telah menimbulkan pemberontakan, penindasan, dan perang di tempat-tempat seperti Bosnia, Azerbaijan, dan Georgia. Dengan melihat demokrasi-demokrasi di Afrika dan Asia pada 1960-an, demokrasi sama sekali tidak berjalan dalam lingkungan dengan etnik yang kuat (Zakaria, 1997).

Penjelasan Fereed Zakaria di atas senada dengan pendapat Marc F. Plattner. Marc F. Plattner dalam bukunya yang berjudul *Liberalisme dan Demokrasi*, menyebutkan bahwa liberalisme dan demokrasi merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Menurut Plattner, sebagian besar negara di belahan dunia memisahkan demokrasi dengan liberalisme. Ketika pemerintah tertentu terpilih melalui pemilu yang adil, pemerintah tersebut memerintah dengan kediktatoran

dalam berbagai bentuk seperti militer, partai tunggal, revolusioner, dan Marxis-Lenin (Plattner, 1998).

Selanjutnya kediktatoran ini menolak pemilu yang diikuti oleh banyak partai dan bebas. Dengan demikian menurut Plattner, pemilu yang diselenggarakan untuk menjatuhkan rezim diktator pada kenyataannya digantikan oleh rezim yang paling tidak ingin demokratis. Di antara negara-negara yang menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil, banyak diantaranya yang gagal menghadirkan perlindungan bagi kebebasan individu dan ketaatan terhadap hukum yang biasanya terdapat di negara yang telah lama berdemokrasi. Bagi Plattner, sebagian besar dari rezim-rezim baru ini adalah demokrasi pemilihan umum dan bukan demokrasi liberal (Plattner, 1998).

Melihat fakta-fakta di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan demokratis adalah tipe ideal pemerintahan yang sempurna, akan tetapi tidak dapat dipertahankan pada negara di dunia ketiga melalui jalan pemilu. Begitu juga dengan Iran, pemerintah Amerika Serikat tidak dapat memperkuat demokrasi di Iran melalui jalan pemilu mengingat Iran merupakan negara dunia ketiga yang juga berpotensi menyalahgunakan pemilu dan ditambah lagi dengan kelompok garis keras keagamaan di Iran sangat anti-Amerika. Dengan demikian, penjelasan Fereed Zakaria dan Marc F. Plattner di atas dapat dijadikan alasan bagi kelompok Neokonservatif tentang mengapa mereka lebih memilih intervensi militer daripada pembentukan negara demokratis dalam perkara Iran.

Selanjutnya, John Stuart Mill akan mengemukakan pendapatnya. John Stuart Mill dalam *Representative Government* yang dikutip dalam Ikenberry menyatakan bahwa kolonialisme merupakan hal yang benar (Ikenberry, 2001). Bagi Mill, pemerintahan perwakilan merupakan pemerintahan yang sempurna akan tetapi tidak dapat diterapkan pada setiap negara. Negara yang tidak dapat menerapkan pemerintahan perwakilan menurut asumsi Mill adalah negara yang sebagian besar penduduknya merupakan orang-orang barbar atau terbelakang. Negara tersebut akan menjumpai kesulitan serius untuk membuat demokrasi

berjalan karena rakyatnya tidak menghargai pemerintahan perwakilan. Maka dalam penilaian Mill, pemerintahan yang cocok bagi orang-orang tersebut adalah pemerintahan kolonialisme yang berasal dari luar. Menurut Mill, kolonialisme akan memacu rakyat barbar atau terbelakang untuk memahami apa yang membuat demokrasi bekerja (Ikenberry, 2001).

Berdasarkan pendapat John Stuart Mill di atas, penulis menyimpulkan bahwa penguatan demokrasi di Iran tidak dapat dilakukan melalui pemerintahan pemilu. Penguatan demokrasi di Iran hanya dapat dilakukan melalui transformasi radikal. Iran tidak dapat menerapkan pemerintahan pemilu karena sebagian besar penduduknya merupakan orang-orang barbar atau terbelakang. Iran akan menjumpai kesulitan serius untuk membuat demokrasi berjalan karena rakyatnya tidak menghargai pemerintahan pemilu. Sementara itu pemerintah terpilihnya akan menyalahgunakan kekuasaan dengan merampas hak-hak rakyatnya seperti yang terjadi sekarang ini ketika Iran di bawah pemerintah Ahmadinedjad membuat kebijakan terhadap kaum wanita untuk menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Maka, menurut pandangan penulis, untuk menguatkan demokrasi di Iran, Amerika Serikat harus memainkan peran imperialisme di wilayah ini. Kolonialisme Amerika Serikat melalui penggunaan kekuatan militer akan memacu rakyat Iran untuk memahami apa yang membuat demokrasi bekerja. Seperti yang dijelaskan di atas, metode non-imperialisme terbukti tidak efektif dalam menguatkan demokrasi di Iran. Hanya metode imperialisme melalui intervensi militer saja yang mampu menguatkan demokrasi di Iran. Dengan demikian, penjelasan-penjelasan di atas telah menjadi alasan bagi kelompok Neokonservatif dalam mendorong pemerintah Bush untuk melakukan strategi unilateral imperialisme dengan doktrin *preemption* kepada Iran.

Berikut ini akan dijelaskan pula alasan lain mengapa kelompok Neokonservatif lebih memilih melakukan intervensi militer dalam kebijakan luar negeri Amerika di Iran.

Ketika peradaban negara yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan, maka konflik internasional tidak akan pernah berakhir. Permasalahan nuklir Iran dan dukungan Iran kepada terorisme akan muncul sebagai akibat dari konflik internasional yang berasal dari perbedaan peradaban. Perbedaan peradaban ini menyebabkan terjadinya benturan peradaban seperti yang dikatakan oleh Samuel Huntington. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis sajikan secara detail argumen Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul *Clash of Civilization* yang ditulis pada tahun 1993 tentang benturan peradaban.

### ***Benturan Peradaban***

Samuel P. Huntington dalam *Clash of Civilization* menuliskan bahwa:

Pertama, perbedaan di antara peradaban bukan hanya nyata, melainkan juga mendasar. Peradaban dibedakan satu sama lain oleh sejarah, bahasa, kebudayaan, tradisi, dan yang paling penting agama. Perbedaan-perbedaan ini merupakan produk yang dihasilkan selama berabad-abad. Mereka tidak akan mudah lenyap. Mereka jauh lebih mendasar dibanding perbedaan-perbedaan di antara ideologi-ideologi politik dan rezim-rezim politik. Namun, selama berabad-abad perbedaan di antara peradaban telah menghasilkan berbagai konflik yang begitu berkepanjangan dan keras. Kedua, dunia menjadi sebuah tempat yang lebih kecil. Hubungan timbal balik yang terjadi di antara masyarakat dari peradaban yang berbeda semakin meningkat, peningkatan interaksi ini menguatkan kesadaran peradaban dan kepekaan akan perbedaan di antara peradaban maupun persamaan dalam peradaban. Ketiga, proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia memisahkan manusia dari identitas lokal yang sudah lama ada. Proses tersebut juga melemahkan negara bangsa sebagai sumber identitas. Di banyak bagian dunia, agama mengisi celah ini, seringkali dalam bentuk gerakan-gerakan yang diberi nama fundamentalis. Keempat, meningkatnya kesadaran peradaban diperkuat oleh peran ganda Barat. Di satu sisi, Barat sedang berada di puncak kekuasaan. Pada saat yang sama, dan mungkin sebagai akibatnya, fenomena kembali ke akar terjadi di antara peradaban-peradaban non-Barat. Barat di puncak kekuasaannya melawan non-Barat yang memiliki hasrat, keinginan, dan sumber daya yang semakin besar untuk membentuk dunia dalam cara-cara non-Barat. Kelima, karakteristik dan perbedaan budaya tidak mudah dipadamkan dan dengan demikian tidak mudah dikompromikan dan dipecahkan dibanding perbedaan politik dan ekonomi (Huntington, 1993: 57-59).

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Samuel Huntington mengenai kemungkinan perbenturan peradaban ini. Pertama, bagi Huntington, perbedaan atau perbenturan peradaban ini adalah sesuatu yang nyata dan bersifat fundamental. Satu peradaban menjadi berbeda dengan yang lainnya karena sejarah, bahasa, tradisi, dan yang paling penting adalah agama. Kedua, interaksi antar manusia yang berbeda peradabannya semakin nampak sehingga tanpa bisa dibendung interaksi pertikaian peradaban pun akan meningkat. Ketiga, terjadinya proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia memisahkan umat manusia dari identitas lokalnya. Manusia yang tertinggal dalam modernisasi ekonomi dan perubahan sosial cenderung menggunakan fundamentalisme agama dalam menyelesaikan persoalan dunia. Dengan demikian apa yang dimaksud dalam tulisan Samuel Huntington adalah bahwa konflik besar antar umat manusia akan terjadi antar bangsa dan kelompok dari peradaban yang berbeda (Huntington, 1993).

Melihat realitas yang disampaikan Samuel Huntington tersebut, intervensi militer yang diusung kelompok Neokonservatif merupakan jalan terbaik untuk menyatukan peradaban yang berbeda mengingat jalan lain tidak bisa dilakukan dikarenakan karakteristik peradaban tidak seelastis karakteristik ekonomi dan politik. Orang bisa saja berganti dan membangun ideologi, akan tetapi mereka sangat jarang berganti agama bahkan tidak pernah berganti etnik. Jadi, persatuan peradaban tidak akan pernah tercapai. Ketika intervensi militer dilaksanakan, dunia akan hanya berada pada peradaban yang satu yaitu peradaban Barat.

Dengan demikian, apabila umat manusia berada dalam sebuah peradaban yang sama, maka konflik kekerasan antar negara dapat direduksi. Intervensi militer terhadap Iran merupakan langkah untuk menghilangkan sebuah benturan peradaban seperti yang dikatakan Samuel Huntington. Selain sebagai langkah untuk menghilangkan benturan peradaban, intervensi militer yang diusung kelompok Neokonservatif juga akan menciptakan akhir sejarah seperti yang disampaikan Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul *End of History* yang ditulis pada tahun 1989 di bawah ini.

## ***Akhir Sejarah***

Francis Fukuyama dalam karyanya *End of History* menyampaikan sebuah ide bahwa:

Ada suatu proses yang lebih besar yang sedang terjadi, suatu proses yang memberi koherensi dan keteraturan pada berita-berita utama sehari-hari. Di abad ke-20 kita menyaksikan dunia yang telah maju terperosok ke dalam suatu ledakan kekerasan ideologi, saat liberalisme bertarung dengan sisa-sisa absolutisme, kemudian dengan bolshevisme dan fasisme, dan terakhir dengan Marxisme baru yang mengarah pada bencana besar perang nuklir. Namun abad yang mulai bergulir dengan penuh kepercayaan diri pada kemenangan pamungkas demokrasi Liberal Barat ini pada ujungnya kembali sepenuhnya ke titik awal: bukan menuju akhir ideologi atau perpaduan antara kapitalisme dan sosialisme seperti diperkirakan sebelumnya, melainkan menuju kemenangan penuh liberalisme ekonomi dan politik. kemenangan Barat, kemenangan ide Barat, merupakan bukti kuat dari pudarnya semua sistem alternatif yang ada bagi liberalisme Barat...Barangkali yang kita saksikan bukanlah sekedar akhir Perang Dingin atau bergulirnya periode tertentu dari sejarah paska perang, melainkan akhir sejarah, yakni, titik akhir dari ideologi umat manusia dan makin universalnya demokrasi Liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan umat manusia (Fukuyama, 1989: 1-3).

Francis Fukuyama berasumsi bahwa kejayaan Liberalisme Kapitalis Barat akan merupakan bentuk final dari tipe pemerintahan umat manusia. Ia menekankan bahwa mulai saat ini semua evolusi pemerintahan yang ada pada akhirnya akan bermuara pada liberalisme kapitalis barat (Fukuyama, 1989).

Dengan demikian, kebijakan intervensi militer terhadap Iran yang diusung oleh kelompok Neokonservatif ini adalah untuk merealisasikan bentuk final dari tipe pemerintahan umat manusia seperti yang dikatakan Francis Fukuyama. Mengingat garis keras kelompok fundamentalis Iran sulit ditembus dengan jalan damai, maka evolusi pemerintahan yang pada akhirnya bermuara pada liberalisme kapitalis barat seperti yang dikatakan Fukuyama, hanya bisa dilakukan melalui intervensi militer.

Berdasarkan pendapat Francis Fukuyama dan Samuel Huntington di atas, maka dapat disimpulkan bahwa intervensi militer yang diusung kelompok Neokonservatif adalah untuk memaksa Iran berada dalam peradaban yang sama dengan Amerika Serikat. Apabila Iran mengadopsi peradaban yang sama dengan Amerika Serikat, maka permasalahan program pengembangan nuklir Iran, dukungan Iran kepada kelompok-kelompok teroris, penyangkalam Iran terhadap Holocaust, dan peluang Iran untuk mendominasi minyak di Timur Tengah akan hilang dengan sendirinya. Untuk memaksa Iran agar berada dalam peradaban yang sama dengan Amerika, maka intervensi militer adalah pilihan yang tepat untuk dilakukan.

Dengan demikian, penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan dalam bab ini telah menunjukkan alasan kaum Neokonservatif mendorong pemerintah Bush untuk melakukan intervensi terhadap Iran. Dalam bab selanjutnya akan dibahas bagaimana kelompok Neokonservatif mendorong pemerintah Bush untuk melaksanakan kebijakan radikan di Iran.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK NEOKONSERVATIF MENDESAK PRESIDEN BUSH UNTUK MELAKUKAN INTERVENSI MILITER TERHADAP IRAN**

Untuk merealisasikan tujuan seperti yang telah dijelaskan di atas, kelompok Neokonservatif melakukan upaya-upaya untuk memengaruhi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif Amerika Serikat agar pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan intervensi militer terhadap Iran. Berikut ini akan penulis jelaskan mengenai bagaimana kelompok Neokonservatif memberikan pengaruhnya terhadap lembaga legislatif dan lembaga eksekutif untuk melakukan intervensi militer terhadap Iran. Penulis akan mulai dari lembaga legislatif dan kemudian dilanjutkan dengan lembaga eksekutif.

#### **IV.1. Kelompok Neokonservatif Mempengaruhi Lembaga Legislatif**

AIPAC memegang peran paling penting untuk memengaruhi Kongres Amerika Serikat. Pada Tahun 2006, ketika pemilihan umum calon anggota legislatif sedang berlangsung, AIPAC terus mengikuti perkembangan hasil pemungutan suara di Kongres dan menyediakan catatan tersebut bagi para anggotanya untuk memutuskan calon mana atau komite aksi politik mana yang harus didukung (Mearsheimer dan Walt, 2010). Setelah mengikuti hasil perkembangan pemungutan suara di Kongres, anggota-anggota AIPAC bersepakat untuk mendukung Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse, Robert Menendez (Partai Demokrat-New Jersey), Brad Ellsworth (Partai Demokrat-Indiana), Gary Ackerman, dan Tom Lantos (*CounterPunch.org*, 2006).

Setelah menunjuk mereka menjadi calon anggota Kongres yang akan didukung, AIPAC mengadakan pertemuan dengan mereka. Dalam pertemuan yang diadakan AIPAC, para calon ini menerima informasi yang mendalam untuk membantu mereka memahami secara lengkap situasi tentang Timur Tengah secara

keseluruhan. Kemudian AIPAC mengarahkan pengaruhnya dengan membujuk para calon tersebut untuk mengikuti arahannya agar menjalankan agenda kebijakan kelompok Neokonservatif. Setelah para calon bersepakat untuk memenuhi segala tuntutan AIPAC, para calon tersebut diberi dana kampanye untuk mendapatkan akses (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Berdasarkan data *Federal Election Commission* (FEC), sekitar 46 anggota dewan direksi AIPAC memberikan sumbangan lebih dari 3 juta dollar untuk para calon legislator yang pro-Neokonservatif (*American Prospect*, 2002). Sedangkan menurut *Washington Post* tahun 2004, anggota-anggota dewan AIPAC telah menyumbangkan sekitar 72.000 dolar kepada komite-komite politik (*Washington Post*, 2004).

Sementara itu, *Center for Responsive Politics* (CRP) menyatakan bahwa 30 komite aksi politik pro-Neokonservatif telah terjun secara aktif dalam pemilihan umum dan pada sekitar pertengahan tahun 2006 kelompok ini telah memberikan lebih dari 3 juta dollar kepada calon-calon dari kedua partai (*Opensecrets*, 2006). Selain itu menurut *Economist*, kelompok Neokonservatif telah menyumbangkan hampir 57 juta dollar kepada calon dan partai-partai (*Economist*, 2007).

Selain memberikan dukungan keuangan kepada para calon yang didukung, AIPAC juga membantu menghubungkan calon-calon tersebut dengan donor-donor dan sumber-sumber dana lain. AIPAC mengatur pertemuan-pertemuan para calon legislatif tersebut dengan para calon donor dan penggalang dana. Setelah membuat kesepakatan dengan AIPAC, para calon anggota Konggers yang didukung oleh AIPAC tersebut mendapatkan sejumlah besar dana yang akan digunakannya dalam pertarungan pemilihan umum (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Pada tahun 2006 Senator Joseph Lieberman menerima lebih dari 145.000 dollar dari kelompok Neokonservatif untuk mempertahankan kursinya dari calon independen Ned Lamont dalam pemilihan primer partai Demokrat. Dalam tahun

yang sama, kelompok Neokonservatif memberikan sumbangan senilai 76.000 dolar kepada Sheldon Whitehouse untuk mengalahkan pemangku jabatan Senator Lincoln Chaffee dari partai Republik-Rhode Island (*Opensecrets*, 2006).

Kelompok Neokonservatif juga memberikan sumbangan keuangan kepada Robert Menendez (Partai Demokrat-New Jersey) dan Brad Ellsworth (Partai Demokrat-Indiana). Pada tahun 2006 dalam sebuah pemilihan umum untuk komisi-komisi yang berurusan dengan Timur Tengah, anggota kelompok Neokonservatif, Waxman mendudukan Gary Ackerman (Partai Demokrat-New York) menjadi anggota Konggres. Sementara itu seorang pendukung neokonservatif lainnya Tom Lantos (Partai Demokrat-California) menjadi ketua *Committee on Foreign Affairs* (JTA.org, 2006).

Selain memberikan dukungan keuangan kepada para calon legislatif yang mendukung agenda kaum Neokonservatif, AIPAC akan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak bersedia melaksanakan agenda kelompok Neokonservatif dengan cara mengalihkan aliran dana kampanye kepada lawan politiknya. Pada tahun 2002, anggota AIPAC yang mengarahkan pembuatan kebijakan AIPAC, Mayer Mitchell menyingkirkan anggota Konggres Earl Hilliard (partai Demokrat-Alabama). Mitchell mengalihkan dana kampanye Hilliard kepada lawan politiknya sehingga Hilliard memperoleh bantuan keuangan dari para pendukung AIPAC di seluruh negeri. Akibatnya, Earl Hilliard kehilangan jabatannya sebagai anggota Konggres (*New York Times*, 2002).

Di tahun 2006, anggota Konggres perempuan Cynthia McKinney (Partai Demokrat-Georgia) tidak bersedia melaksanakan agenda kelompok Neokonservatif. Maka AIPAC mengucurkan dana kampanye ke lawan politiknya. Akibatnya McKinney diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Konggres dan ketika ia mengikuti pemilihan ulang 2006, kelompok Neokonservatif memberikan dana kampanye kepada lawan politiknya, Hank Johnson sekurangnya 34.000 dolar sehingga McKinney mengalami kekalahan (*Hillnews*, 2006).

Kelompok Neokonservatif selain memberikan dukungan keuangan kepada anggota legislatif juga memberikan dukungan keuangan kepada para pembuat undang-undang. Pegawai Staf Konggres ini merupakan unsur utama dalam proses legislatif. Kelompok Neokonservatif biasa menyebut dukungan keuangan yang diberikan kepada para pembuat undang-undang ini sebagai subsidi legislatif. Menurut kelompok Neokonservatif, subsidi legislatif ini untuk mengarahkan undang-undang agar sesuai dengan agenda mereka. Subsidi legislatif ini akan diberikan kepada para pembuat undang-undang untuk menganalisis masalah, membuat kerangka legislasi, dan menawarkan jasa menyusun pokok-pokok pembahasan untuk pidato di depan konstituen (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Ada kalanya Perwakilan-perwakilan dari kelompok Neokonservatif ikut ambil bagian secara langsung dalam proses ini. Mereka membantu para staf membuat draf untuk legislasi, memasok mereka dengan pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan oleh legislator di depan umum, membantu menuliskan surat-surat "*Dear College*" yang dikirimkan oleh para legislator untuk merapatkan barisan seputar isu-isu penting dan merumuskan serta mengedarkan surat-surat terbuka yang dirancang untuk menyampaikan tekanan Konggres kepada lembaga eksekutif. AIPAC juga membantu para pembuat undang-undang ini untuk membuat draf pidato, membuat rancangan undang-undang, memberikan saran seputar taktik, menyelenggarakan penelitian, mencari sponsor, dan mencari dukungan (Mearsheimer dan Walt, 2010). Dengan demikian kelompok Neokonservatif telah memberikan pengaruh secara langsung ke dalam proses legislatif dan proses pembuatan kebijakan di dalam pemerintah Bush.

Pada tanggal 19 Mei 2003, seorang anggota kelompok Neokonservatif Senator Sam Brownback mengumumkan bahwa ia mempunyai rencana mengajukan legislasi untuk mendanai kelompok-kelompok oposisi dan mendukung demokrasi di Iran. Legislasi yang disebut *Iran Democracy Act* didukung oleh AIPAC, JINSA, dan *Coalition for Democracy in Iran*, dengan pendiri antara lain Morris Amitay dari JINSA dan Michael Ledeen dari AEI (*National Iranian American Council*, 2003).

Berdasarkan informasi yang didapat dari Mearsheimer dan Walt, penulis mengasumsikan bahwa kelompok Neokonservatif memberikan dana kepada para pembuat undang-undang untuk membuat *Iran Democracy Act*. Sementara itu, perwakilan-perwakilan dari kelompok Neokonservatif ikut ambil bagian secara langsung dalam proses dengan membuatkan draf untuk legislasi, memberikan pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan oleh legislator di depan umum tentang ancaman Iran, dan menuliskan surat-surat “*Dear College*” yang dikirimkan oleh para legislator untuk merapatkan barisan seputar isu-isu program nuklir Iran dan dukungan Iran terhadap kelompok teroris.

Setelah itu, dalam asumsi penulis, rencana Undang-undang tersebut diajukan di *House of Representatives* dan Senat oleh Brad Sherman (partai demokrat-California). Ketika rencana *Iran Democracy Act* tersebut diajukan di Kongres, tidak ada perdebatan sengit yang terjadi. Biasanya isu-isu yang terkait dengan aborsi, pengawasan senjata, lingkungan, kebijakan perdagangan, penanganan kesehatan, dan imigrasi akan selalu memicu perdebatan di Kongres ketika diajukan. Akan tetapi ketika kelompok Neokonservatif mengajukan isu seputar rencana demokrasi di Iran, para pengkritik di Kongres bungkam dan tidak melakukan debat. Tidak ada kritik terhadap kelompok Neokonservatif dan tidak ada pertimbangan di dalam Kongres ketika membahas *Iran Democracy Act* tersebut.

Maka dari itu, pada akhir Juli 2003, legislasi *Iran Democracy Act* tersebut diloloskan oleh kedua lembaga di Kongres, walaupun pasal tentang pendanaan dihilangkan dari naskah finalnya. Tanpa perdebatan, Kongres Amerika Serikat meluluskan sebuah undang-undang yang mendukung penggantian rezim di Iran (*CQ Today*, 2007).

Bahkan pada pertengahan Maret 2007, Kongres membantu kelompok Neokonservatif untuk mencoba menyisipkan sebuah syarat tambahan rencana anggaran Pentagon yang akan memerlukan pengesahan dari Presiden Bush

sebelum digunakan untuk menyerang Iran ke dalam undang-undang tersebut (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Akan tetapi AIPAC menentang dengan tegas. AIPAC memandang rencana anggaran Pentagon tersebut akan menggagalkan opsi militer terhadap Iran dari *Iran Democracy Act*. Tanpa perdebatan, Kongres menyetujui saran AIPAC tersebut. Dengan bantuan beberapa wakil rakyat seperti Gary Ackerman, Eliot Engel, dan Shelley Berkley (Partai Demokrat-Nevada), syarat tambahan dari rencana Pentagon tersebut dihilangkan (*CQ Today*, 2007).

#### **IV.2. Kelompok Neokonservatif Mempengaruhi Lembaga Eksekutif**

Setelah berhasil membuat Kongres Amerika Serikat meluluskan sebuah undang-undang yang mendukung penggantian rezim di Iran, anggota kelompok Neokonservatif seperti Elliot Abrams, Karl Rove, John Bolton, Douglas Feith, Aaron Friedberg, John Hannah, I. Lewis Libby, William Lutti, Richard Perle, Paul Wolfowitz, dan David Wurmser melakukan perundingan (McClellan, 2008), untuk menyerahkan legislasi tersebut kepada Presiden Bush.

Seperti yang kita ketahui, Elliot Abrams dan Karl Rove merupakan penasihat senior Presiden Bush. Selain menjadi penasihat senior Presiden Bush, Karl Rove juga merupakan ahli strategi politik di dalam pemerintahan Bush yang memiliki kewenangan sangat besar di Gedung Putih. Karl Rove juga dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Presiden Bush dan menjadi orang yang membuat Presiden Bush duduk di kursi kepresidenan Amerika Serikat. Presiden Bush hampir selalu mengikuti arahan Karl Rove dalam menjalankan roda pemerintahan Amerika (McClellan, 2008).

Karl Rove menjadi salah satu dari pemain kunci bagaimana Gedung Putih dijalankan. Rove bertanggungjawab mengawasi politik dan strategi politik serta mengendalikan empat kantor penting di dalam Gedung Putih. Keempat kantor tersebut adalah kantor Inisiatif Strategis, Kantor Urusan Politik, Kantor Hubungan Masyarakat, dan Kantor Urusan Antar Pemerintah (McClellan, 2008).

Ketika legislasi *Iran Democratic Act* diserahkan kepada Presiden Bush, ia tidak mengkritik atau memperdebatkan legislasi tersebut. Ia mempelajarinya dengan baik. Setelah mempelajari dengan seksama, George W. Bush kemudian melaksanakan undang-undang tersebut. Langkah pertama yang dijalankan Presiden Bush dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut adalah mendanai kelompok-kelompok pembelot Iran untuk mendukung misi Amerika dalam melakukan serangan terhadap Iran. Selanjutnya, Pemerintah Bush menunjuk Douglas Feith untuk memainkan peran yang pokok dalam mengembangkan rencana pelaksanaan intervensi militer terhadap Iran (*Rolling Stones*, 2006).

Dalam artikel *The Coming Wars*, wartawan terkemuka Amerika Serikat Seymour Hersh memaparkan bahwa intervensi militer yang dijalankan pemerintah Bush kepada Iran akan dilakukan secara diam-diam dan melibatkan serangan udara. Dalam artikel *The Iran Plans*, Seymour Hersh memaparkan rencana operasi klandestin di Iran dan rencana serangan udara yang akan dilakukan pemerintahan Bush terhadap Iran. Menurut Hersh, pemerintah Bush akan menghancurkan instalasi nuklir Iran adalah dengan mengebom bunker dengan menggunakan penghancur nuklir taktis seperti B61-11 (*New Yorkers*, 2006).

Lebih lanjut McInerney mengungkapkan rincian peralatan perang angkatan udara AS yang dilibatkan dalam operasi militer ke Iran, meliputi sepuluh pesawat siluman, pesawat pembom B-2, pesawat tempur F-117 and F-22. Pesawat-pesawat perang angkatan udara ini akan menjadi bagian dari serangan pertama ke Iran. Pesawat pembom B-2 ini mampu melepaskan sekitar 80 sampai 250 kilogram bom di 80 tempat berbeda yang menjadi target secara simultan. Sedangkan serangan udara kedua akan melibatkan empat ratus pesawat (B-52, B-1, F-15, F-16 and F-18). Lima ratus missil akan ditembakkan ke arah target-target di Iran dari kapal-kapal perang Amerika Serikat ini. Sementara seratus lima puluh pesawat khusus akan dikirim untuk melakukan pengisian bahan bakar dan operasi intelejen (*NewsCenter/middle-east/Democracy Now*, 2007).

Adapun perusahaan pabrik kimia Amerika Serikat, *Bechtel* yang memproduksi sarin dan gas mustard untuk membunuh para pemberontak Iran, Kurdi, dan Syiah, menyediakan jet-jet tempur, tank, dan misil, serta melatih tentara untuk mengoperasikannya (Perkins, 2007).

Selain itu, pakar-pakar sipil Departemen Pertahanan, dibawah pimpinan Douglas Feith, telah bekerja bersama perencana-perencana dan konsultan-konsultan Israel untuk mengembangkan dan menghaluskan rencana penyerangan sasaran-sasaran nuklir, senjata kimia, dan peluru kendali di wilayah Iran. Pentagon juga telah melakukan operasi pengumpulan informasi intelijen di wilayah Iran dan telah memperbarui rencana cadangannya untuk penyerbuan yang lebih luas ke Iran (Mearsheimer dan Walt, 2010)

Sementara itu, Yerry Niko dalam artikel di *NewsCenter/middle-east/Democracy Now* pada 16 Februari 2007 menyatakan bahwa di sebelah utara Iran, tepatnya di Azerbaijan, militer Amerika telah mempersiapkan markas militer dalam skala besar. Markas ini dipersiapkan dengan perbekalan logistik untuk pasukan multinasional serta pasokan amunisi. Azerbaijan dipilih karena memiliki kedekatan dengan etnis minoritas Azeri yang sedang melawan Iran. Dalam artikel tersebut, Yerry Niko juga mengatakan bahwa AS telah menempatkan kapal induk *USS John C Stennis* serta *USS Dwight D Eisenhower* di Teluk Persia. *USS John C Stennis* adalah kapal induk *Nimitz* bertenaga nuklir yang dapat menampung 5.000 awak sekaligus 80 pesawat tempur (*Newscenter/middle-east/Democracy Now*, 2007).

Sebelum memainkan peran yang pokok dalam melaksanakan intervensi militer terhadap Iran, pada tahun 2007, pemerintahan Bush melakukan aksi-aksi konfrontatif yang ditujukan langsung ke Iran. Menurut penulis, aksi-aksi konfrontatif tersebut merupakan realisasi dari *Iran Democratic Act*. Hanya saja berada dalam skala kecil. Tujuannya adalah sebagai persiapan untuk aksi konfrontatif dalam skala besar. Aksi-aksi ini juga sebagai latihan langsung untuk aksi dalam skala besar.

Pada Kamis 11 Januari 2007, Pasukan marinir Amerika Serikat mencoba menangkap panglima-panglima Pengawal Revolusi dan Brigade Quds yang menurut laporan beroperasi di Irak. Lima buah helikopter Amerika Serikat berkumpul di atas sebuah gedung di Arbil, Irak. Dari helikopter-helikopter tersebut, puluhan marinir Amerika Serikat turun ke atap gedung menggunakan tali (*Baztab*, 2007).

Di darat belasan *humvee* dan kendaraan lapis baja pengangkut pasukan memblokir jalan-jalan di sekitarnya dan mengepung gedung konsulat tersebut. Setelah menempati posisi masing-masing, pasukan marinir dengan menggunakan pengeras suara memberikan instruksi dalam bahasa Inggris, Arab, dan Persia kepada para penghuni gedung tersebut untuk keluar. Karena tak ada satu orang pun yang keluar, pasukan marinir Amerika Serikat langsung mendobrak jendela dan melemparkan granat-granat pengejut. Asap mengepul dari jendela itu, isyarat bagi marinir-marinir lain untuk mendobrak pintu-pintu. Setelah masuk ke dalam gedung, pasukan marinir menangkap orang-orang yang sedang berada di dalam gedung tersebut. Pasukan marinir juga mengambil dokumen dan komputer yang ada di situ (*Baztab*, 2007). Sementara itu di Washington, Presiden Bush berpidato kepada rakyatnya:

‘Selamat malam. Malam ini di Irak, angkatan Bersenjata Amerika Serikat sedang berjuang melakukan sesuatu yang akan menentukan arah perang global melawan teror yang mengancam keselamatan kita di sini. Strategi baru yang saya ringkaskan malam ini akan mengubah peran Amerika Serikat di Irak dan memudahkan keberhasilan kita dalam perjuangan melawan teror. Mula-mula kami akan menangani Iran dan Suriah. Dua rezim ini sengaja membiarkan teroris dan gerakan perlawanan menggunakan wilayah mereka untuk keluar masuk Irak. Iran menyediakan dukungan baik logistik maupun personil serangan-serangan kepada pasukan Amerika Serikat. Kita akan menghentikan aliran dukungan dari Iran dan Suriah. Kita akan mencari serta menghancurkan jaringan yang memasok persenjataan modern dan pelatihan kepada musuh-musuh kita di Irak. Iran membantu kelompok Syiah radikal membentuk pasukan berani mati di Irak. Akibat dari kegagalan ini jelas, Iran akan makin percaya diri dalam ambisi senjata nuklirnya. Kita akan mencegah Iran mencapai penguasaan senjata nuklir dan menjadi dominan di kawasan ini’ (*White House*, 2007).

Setelah melakukan aksi konfrontatif di Irak, pada 23 Mei 2007, sebuah kapal induk Amerika Serikat, sembilan kapal perang Amerika Serikat, dua kapal induk bertenaga nuklir yang membawa ratusan pesawat tempur, dan 17.000 prajurit bergerak dalam formasi rapat melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Persia. Kemudian, Presiden Bush mengumumkan bahwa ia juga telah mengirimkan sebuah armada kapal induk tambahan ke Teluk Persia serta memasang sistem pertahanan anti peluru kendali Patriot untuk memperkuat negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council*. Ada sebuah laporan bahwa Amerika Serikat sedang mencoba gagasan penggunaan bom nuklir taktis untuk menyerang beberapa fasilitas nuklir Iran yang telah dibangun jauh di bawah tanah (Mearsheimer dan Walt, 2010).

Bersamaan dengan itu, pejabat-pejabat militer Amerika Serikat menemukan indikasi bahwa Iran mengirimkan komponen-komponen pokok untuk pembuatan ranjau-ranjau pinggir jalan berdaya ledak tinggi ke Irak untuk digunakan terhadap pasukan Amerika. Penasihat Keamanan Nasional Presiden Stephen Hadley dan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak mengesampingkan kemungkinan pasukan Amerika akan menyebrang ke wilayah Iran untuk memburu orang-orang Iran yang terlibat dalam pengiriman ranjau-ranjau darat dan senjata-senjata lain (*New York Times*, 2007).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kaum Neokonservatif telah berhasil mempengaruhi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif Amerika Serikat untuk merealisasikan *Iran Democratic Act*, sebuah undang-undang yang mendorong pemerintah George W. Bush untuk melakukan intervensi militer terhadap Iran. Peluang Presiden Bush untuk memainkan peran yang pokok dalam melaksanakan intervensi militer terhadap Iran sebelum meninggalkan Gedung Putih memang kecil, namun ada pula sejumlah kemungkinan bahwa penerusnya akan melakukannya.

## BAB V

### KESIMPULAN

Program pengembangan nuklir Iran, dukungan Iran kepada kelompok teroris, penyangkalan pemimpin Iran terhadap *Holocaust*, dan peluang Iran untuk mendominasi kawasan minyak di Timur Tengah telah menjadi suatu permasalahan besar bagi Amerika Serikat. Ketika permasalahan ini muncul ke permukaan, sebuah mekanisme politik di dalam sistem politik luar negeri pemerintah Bush terbuka lebar. Ketika mekanisme politik ini terbuka lebar, kelompok Neokonservatif berupaya menerapkan agendanya di dalam pemerintahan George W. Bush. Selanjutnya, agenda kelompok Neokonservatif tersebut menghasilkan kebijakan luar negeri Amerika yang radikal di Iran. Jadi, kebijakan Amerika di Iran merupakan hasil agenda kelompok kepentingan Neokonservatif.

Kaum Neokonservatif menerapkan kebijakan luar negeri Amerika yang bersifat radikal di Iran. Dalam kebijakan tersebut, kaum Neokonservatif menekankan perlunya Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang bersifat unilateralisme dengan penggunaan kekuatan militer terhadap Iran. Alasannya adalah dengan intervensi militer, Amerika dapat memaksa Iran untuk menerima peradabannya dan dengan intervensi militer pula, demokrasi di Iran dapat tercipta.

Sudut pandang yang membuat kaum Neokonservatif menerapkan kebijakan radikal di Iran adalah ideologi Hobbessian Liberalisme, mazhab Jacksonian, dan mazhab Hamiltonian. Sudut pandang ini juga menjadi alasan bagi kelompok Neokonservatif menerapkan mendorong pemerintah Bush untuk menerapkan kebijakan yang radikal di Iran.

Dalam upayanya untuk merealisasikan kebijakan radikal di Iran, kaum Neokonservatif memberikan pengaruh yang signifikan pada kedua lembaga penting di dalam pemerintahan Bush. Di lembaga Legislatif, kaum Neokonservatif memberikan dukungan keuangan yang sangat besar kepada para anggota Kongres agar membuat undang-undang yang sesuai dengan agenda kebijakannya. Di lembaga Eksekutif, kaum Neokonservatif mendudukkan anggota-anggotanya pada posisi-posisi penting seperti presiden, pejabat teras, dan pembuat kebijakan. Presiden Bush sendiri adalah seorang presiden yang diposisikan oleh kaum Neokonservatif. Kemenangan George W. Bush memenangkan kursi kepresidenan Amerika adalah berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum Neokonservatif. Jadi, ketika kaum Neokonservatif menyerahkan agenda kebijakannya yang radikal di Iran, Presiden Bush langsung melaksanakannya.

Dalam merealisasikan agenda kebijakan radikal kaum Neokonservatif terhadap Iran, pada tahun 2007, Presiden Bush memerintahkan pasukan Amerika untuk menangkap lima orang pejabat Iran yang sedang berada di Irak dengan menggunakan helikopter dan kendaraan lapis baja. Pada tahun yang sama, Presiden Bush memerintahkan angkatan laut Amerika untuk bergerak menuju Teluk Persia dengan menggunakan beberapa kapal induk dan pesawat-pesawat tempur Amerika. Akan tetapi intervensi militer skala besar belum sempat dilaksanakan oleh George W. Bush mengingat dalam waktu dekat ia harus segera meninggalkan kursi kepresidenan di Gedung Putih. Jadi, selama ia menjadi presiden, ia baru melaksanakan beberapa aksi konfrontatif dalam skala kecil terhadap Iran dalam upaya merealisasikan agenda kebijakan kaum Neokonservatif yang radikal di Iran.

Dengan demikian, sistem politik Amerika di masa George Bush telah menghasilkan sebuah kebijakan radikal di Iran yang digerakan oleh kaum Neokonservatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter L. 1986. *The Capitalist Revolution: Fifty Proporsitions About Prosperity, Equality And Liberty*. New York.
- Carre, Olivier. *L'utopie Islamique Dans l'Orient Arabe* yang dikutip dalam Lada Boroumand. 2002. *Teror, Islam, dan Demokrasi*. National Endowment for Democracy dan The Johns Hopkinn University Press. Diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Daalder, Ivo H. 2007. *Beyond Preemption: Force And Legitimacy In A Changing World*. Washington DC: Brookings Institution Press.
- Degler, Carl N. 1959. *Out of Our Past*. New York, Cambridge, Philadelphia, San Fransisco, London, Mexico City, Sao Paulo, Sydney: Harper Colophon Books.
- Desch, Michael C. 2008. *America's Liberal Illiberalism*. Harvard College and Massachussets Institute of Technology.
- . 2004. Departemen Luar negeri Amerika Serikat.
- Doyle, Michael W. 1983. *Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs*. Blackwell Publishing.
- Edsall, Thomas B dan Moore, Molly. 2004. *Pro Israel Lobby Has Strong Voice*. Dalam *Washington Post*.
- Esposito L dan Ramazani, R. K. 2001. *Iran at The Crossroads*. New York: Palgrave.
- Fukuyama, Francis. 1989. *End of History*. International Creative Management, Inc. Diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Gaddis, John Lewis. 1982. *Strategies of Containment*. New York: Oxford University Press.
- Harwood, John dan Seib, F. Gerald. 2008. *Pennsylvania Avenue: Profiles In Backroom Power*. New York: Random House.
- Heertz, Noreena. 2003. *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme*, dalam I Wibowo dan Francis Wahono, editor. *Neoliberalisme* Yogyakarta. Cinderelas Pustaka Rakyat Cerdas.

- Hoffman, David. 1993. *Israel Seeking to Convince U.S. That West Is Threatened by Iran*. Washington Post.
- Huntington, Samuel. P. 1993. *Clash of Civilization*. Council on Foreign Relations, Inc. Diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Ibid.* halaman 52.
- Ibid.* halaman 96.
- Ikenberry, G. John. 1996. *American Foreign Policy Theoretical Essays*. New York: Harper Collins College Publishers.
- Ikenberry, G. John. 2001. *American Grand Strategy in the Age of Terror*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ikenberry, G. John. 2004. *The End of the Neoconservative Moment*. Northwestern University Library.
- Kaplan, Lawrence S. 1985. *NATO and The United States, The Enduring Alliance*. Boston: Twagae Publishes.
- Kaplan, Roger. 1997. *Freedom Around the World*. New York: Freedom House.
- Kuncahyono, Trias. 2004. *Dari Damascus ke Baghdad: Catatan Perjalanan Jurnalistik*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Kurth, James. 2003. *Current History: A Journal of Contemporary World Affairs*. Canada and USA.
- Lexington. 2007. *Taming Leviathan*. Dalam *Economist*.
- Marger, Martin N. 1987. *Elites and Masses: An Introduction to Political Sociology*. Wadsworth.
- Mashad, Dhuroruddin dkk. 2005. *Saddam Melawan Amerika*. Jakarta. Pensil-324.
- Massing, Michael. 2002. *Deal Breakers*. Dalam *American Prospect*.
- Mazaar, Michael J. 2007. *The Iraq War and Agenda Setting*. Oxford: Blackwell Publishing.
- McClellan, Scott. 2008. *What Happened: Inside the Bush White House and Washington's Culture of Deception*. New York Times Publishing.
- Mead, Russell Walter. 2002. *Special Providence*. New York and London: Routledge.
- Mearsheimer, John J dan Walt, Stephen M. 2010. *Dahsyatnya Lobi Israel*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Naji, Kasra. 2009. *Ahmadinedjad: Kisah Rahasia Sang Pemimpin Radikal Iran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- O'Donnel, Guillermo. 1979. *Tension in The Bureaucratic-Authoritarian State and The Question of Democracy*, dalam David Collier (ed). *The New Authoritarianism in Latin America*. Princeton: University Press.
- Rusydan. 2008. *Demokrasi AS dan Politik Uang*. Dalam [www.khilafah.com](http://www.khilafah.com).
- Perkins, John. 2007. *John Perkins: Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional*. Jakarta. Ufuk Press.
- Pitaya, V. 2009. *Sepak Terjang Pasukan Komando*. Yogyakarta. Pinus Book Publisher.
- Plattner, Marc. F. 1998. *Liberalisme dan Demokrasi: Dua Hal Yang Tak Terpisahkan*. Foreign Affairs.
- Schmitter, Phillippe C. 1974. *Still The Century of Corporatism?* Dalam Pike, Frederick B dan Strich, Thomas. *The New Corporatism: Social Political Structures in the Iberian World*. Notre Dome: University of Notre Dome Press.
- Shapiro, Ian. 1986. *Evolusi Hak Dalam Teori Liberal*. Jakarta. Yayasan obor Indonesia.
- Shoelhi, Mohammad. 2007. *Di Ambang Keruntuhan Amerika*. Jakarta. Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu.
- Soros, George. 2004. *The Bubble of American Supremacy: Correcting the Misuse of American Power*. New York. Public Affair.
- Spector, Leonard S. 2003. *Secret Quest for The Bomb*. Dalam Yale Global.
- Subono, Nur Iman. 2003. *Taktik Negara Menguasai Rakyat: Sebuah Studi Teori Bentuk Pemerintahan Korporatisme*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Sukarwo, Wirawan. 2009. *Tentara Bayaran AS Di Irak: Sebuah Konspirasi Neoliberal AS Memimpin Untuk Dunia*. Jakarta. Gagas Media.
- Suroso, Bambang. 1995. *Kepemimpinan Reagan, Reaganomics, dan Mekanisme Pasar Amerika Serikat (1981-1988)*. Tesis Master: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Tindall, George Brown. 1984. *America: A Narrative History, volume 1 and 2*. New York: W. W. Norton & Company.
- Waltz, Kenneth N. 1959. *Man The State And War, A Theotitical Analysis*. New York, U.S.A. Columbia University Press.

Zakaria, Fareed. 1997. *Bangkitnya Demokrasi Yang Tak Liberal*. Foreign Affairs.

*Associated Press*. 18 Juni 1998.

*Baztab*. 24 Januari 2007.

Kompas, 14 Juni 2002.

*Reuters*. 16 Januari 1998.

*Reuters*. 2 Februari 1998.

*Reuters*. 8 Februari 1998.

*Reuters*. 21 Februari 1998.

[www.Associated Press.com](http://www.AssociatedPress.com). 1998.

[www.CounterPunch.org](http://www.CounterPunch.org). 2006.

[www.CQ Today.org](http://www.CQToday.org). 2007.

[www.Hillnews.org](http://www.Hillnews.org). 2006.

[www. Inter Press Service. com](http://www.InterPressService.com). 2007.

[www. Jerusalem Post](http://www.JerusalemPost.com). 2007.

[www.JTA.org](http://www.JTA.org). 2006.

[www.National Iranian American Council.com](http://www.NationalIranianAmericanCouncil.com). 2003

[www.newscenter/middle-east/democracy now.com](http://www.newscenter/middle-east/democracy-now.com). 2007

[www.New York Times. com](http://www.NewYorkTimes.com). 2002.

[www.New York Times](http://www.NewYorkTimes.com). 2007.

[www.New Yorkers.com](http://www.NewYorkers.com). 2006

[www.opensecrets.org](http://www.opensecrets.org). 2006.

[www.Rolling Stones.com](http://www.RollingStones.com). 2006.

[www.Washington Post.com](http://www.Washington Post.com) 2003.

[www.washingtonpost.com](http://www.washingtonpost.com). 2007.

[www.White House, Office of the Press Secretary.com](http://www.White House, Office of the Press Secretary.com). 2006.

